



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN RASKIN (BERAS UNTUK
KELUARGA MISKIN) : Studi Kasus : Kelurahan VI Suku
Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok**

SKRIPSI



**SHIN AULY FRIDA S
07115011**

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN RASKIN
(BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN)
(Studi Kasus: Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah
Kota Solok)**



OLEH

**SHIN AULY FRIDA S
07 115 011**



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN RASKIN
(BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN)
(Studi Kasus: Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah
Kota Solok)**

OLEH

**SHIN AULY FRIDA S
07 115 011**

SKRIPSI

**SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
UNTUK MEMPEROLEH GELAR
SARJANA PERTANIAN**

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN RASKIN
(BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN)
(Studi Kasus: Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah
Kota Solok)**

OLEH

**SHIN AULY FRIDA S
07 115 011**

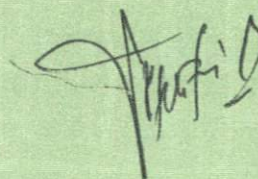
MENYETUJUI:

Dosen Pembimbing I



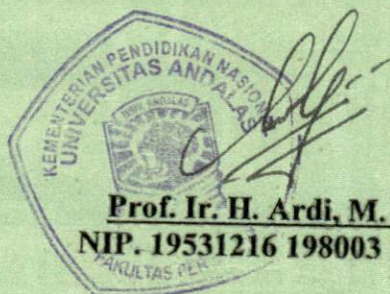
**Dr. Ir. Endry Martius, M.Sc
Nip. 19591031 198603 1 005**

Dosen Pembimbing II



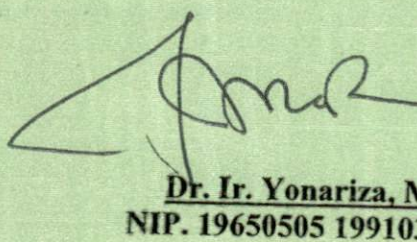
**Syofyan Fairuzi, STP, M.Si
NIP. 1973040 8200604 1 002**

**Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Andalas**



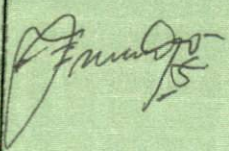
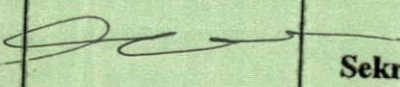
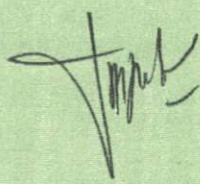
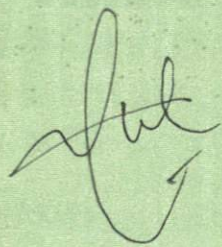

**Prof. Ir. H. Ardi, M. Sc.
NIP. 19531216 198003 1 004**

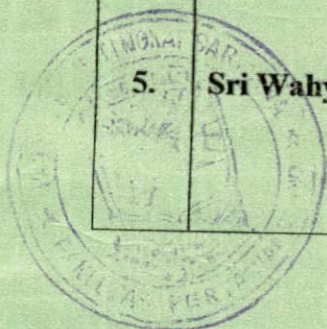
**Ketua Jurusan Sosial Ekonomi
Fakultas Pertanian Univ. Andalas**



**Dr. Ir. Yonariza, M.Sc.
NIP. 19650505 199103 1 003**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Pertanian Universitas Andalas, pada tanggal 11 Maret 2011

No.	Nama	Tanda Tangan	Jabatan
1.	Dr. Ir. Faidil Tanjung, M.Si		Ketua
2.	Dr. Ir. Endry Martius, M.Sc		Sekretaris
3.	Syofyan Fairuzi, S.TP, M.Si		Anggota
4.	Ferdhinal Asful, SP, MSi		Anggota
5.	Sri Wahyuni, S.Pt, M.Si		Anggota



*Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa
(Roma 12:12)*

Takkan habis dan takkan berhenti ku ucapkan syukur atas berkat dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus sepanjang hidup ku ini

Ku persembahkan karya kecil ini untuk Orangtua ku tercinta. Buat Bapak (T.P. Siagian) dan Mamak (R. Sinurat), terimakasih atas semangat dan dukungannya, terimakasih karena setia menjadi tempat berkeluh kesah ku selama ini. Semoga Tuhan membalas setiap tetesan keringat, doa dan pengorbanan yang telah bapak dan mamak berikan. Terimakasih juga untuk kakak ku Mariani Siagian dan bang Robin Siahaan, Abang ku Frans Siagian dan "eda" Mika Manik, kakak ku Ester Siagian, S.Pd atas dukungan yang telah diberikan dan tak lupa buat adikku tersayang Bieroff Siagian (BB perjuangan masih panjang, tetap semangat). Buat Tulang dan Nantulang Evi, buat adik-adikku (Angger, Ririn, Artha dan Berlin), tulang Parlin dan Nantulang, Pak uda dan Tante Tian dan dan untuk semua Keluarga Besar yang tidak dapat disebut satu per satu.

Terimakasih untuk pembimbing ku Pak Dr. Ir. Endry Martius, M.Sc dan Pak Syofyan Fairuzi, S.TP, M.Si atas bimbingan, saran dan masukannya selama penulisan skripsi ini. Dan buat seluruh Dosen dan Karyawan Jurusan SOSEK.

Buat teman-temanku Novi, SP, Ririn, Vana (terimakasih buat hari-hari indah yang telah terlewati), puput, icha, rika, ampuang, denny, riki, hanafi, teteh, Raisa, santi, maya, tia, echi, amy, riska, yuyun, fianinda, eko, bimbim, abak ihsan, beba dan semua anak-anak SOSEK 07. Buat senior ku bg Gomós, bg Tius, Bg Yayan, bg Ilham, bg Endi, kak Ria, SP, kak Rindi, SP, kak Opie, SP, kak Ibeth, SP, kak kesya, kak elsa, kak Ai, SP, kak Eka, SP terimakasih atas bantuannya selama ini. Dan untuk teman-teman kost yang selama ini memberikan semangat Sally, Jessy, Rina, Kak Ami, Ira dan Jee-Jee.

BIODATA

Penulis dilahirkan di Solok, Sumatera Barat pada tanggal 22 November 1989 sebagai anak ke empat dari lima bersaudara, dari pasangan T.P. Siagian dan R. Sinurat. Penulis menamatkan pendidikan di Sekolah dasar (SD) 05 VI Suku Kota Solok pada tahun 2001, SMPN I Solok pada tahun 2004 dan SMAN I Solok pada tahun 2007. Pada tahun 2007 penulis diterima di Fakultas Pertanian Universitas Andalas dengan Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Jurusan Sosial Ekonomi.

Padang, Maret 2011

Shin Auly Frida S

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Efektifitas Pelaksanaan Raskin (Beras Untuk Keluarga Miskin) (Studi Kasus: Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok).**

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Ir. Endry Martius, M.Sc selaku dosen pembimbing I dan Bapak Syofyan Fairuzi, STP, M.Si selaku dosen pembimbing II, yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan dan dorongan serta saran-saran pada penulisan skripsi ini dan juga kepada dosen penguji Bapak Dr. Ir. Faidil Tanjung, M.Si, Bapak Ferdhinal Asful, SP, Msi dan Ibu Sri Wahyuni, SPT, M.Si.

Penulis menyadari bahwa sebagai mahasiswa dan manusia biasa penulis tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Untuk itu, penulis dengan senang hati menerima segala kritikan dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis mengucapkan agar skripsi ini bermanfaat bagi setiap pembaca dan pihak yang memerlukannya.

S.A.F.S

Padang, Maret 2011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Ketahanan Pangan	7
2.2. Kemiskinan	9
2.2.1. Pengertian Kemiskinan	9
2.2.2. Pembagian dan Kriteria Kemiskinan.....	10
2.2.3. Rumah Tangga Miskin	13
2.3. Program Raskin.....	15
2.3.1. Latar Belakang Progra Raskin.....	15
2.3.2. Dasar Hukum Program Raskin.....	16
2.3.3. Pengelolaan Raskin	17
2.3.4. Pagu Raskin	18
2.3.5. Penetapan RTS-PM Raskin.....	19
2.3.6. Penetapan Titik Distribusi.....	20
2.3.7. Mekanisme Distribusi	20
2.3.8. Pengendalian Raskin	22
2.4. Efektifitas Program	23

2.5. Penelitian Terdahulu	24
2.5. Hipotesis	25
III. METODOLOGI	
3.1. Waktu dan Tempat.....	26
3.2. Metode Penelitian	26
3.3. Teknik Pengambilan Sampel	26
3.4. Metode Pengumpulan Data	27
3.5. Variabel Yang Diteliti	28
3.6. Analisa Data	28
3.7. Kerangka Analisis Penelitian	30
3.8. Defenisi Operasional	32
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4. 1. Gambaran Daerah Penelitian dan Identitas Responden.....	35
4. 1. 1. Kondisi Geografis	36
4. 1. 2. Kondisi Demografi.....	36
4.2. Identitas RTS-PM	36
4.3. Proses Pelaksanaan Program Raskin di Kelurahan VI Suku	41
4.4. Efektifitan Pelaksanaan Program Raskin.....	45
V. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	54
5.2. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN.....	58

DAFTAR TABEL

<u>Tabel</u>	<u>Halaman</u>
1. Target Sampel	27
2. Jumlah KK berdasarkan umur, jenis kelamin dan pendidikan.....	37
3. Pekerjaan Responden	38
4. Jumlah tanggungan keluarga responden	38
5. Jumlah penghasilan responden.....	39
6. Kondisi Rumah responden	40
7. Sarana fasilitas rumah responden.....	40
8. Frekuensi makan responden	41
9. Ketepatan Waktu pendistribusian Raskin	49
10. Komponen administrasi raskin.....	50
11. Kualitas Beras	51
12. Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Raskin.....	51

DAFTAR GAMBAR

<u>Gambar</u>	<u>Halaman</u>
1. Kerangka Analisis Penelitian	31

DAFTAR LAMPIRAN

<u>Lampiran</u>	<u>Halaman</u>
1. Matriks data set	58
2. Alokasi beras raskin Kota solok tahun 2010.....	59
3. Jumlah KK miskin Kota Solok.....	60
4. Identitas responden penerima raskin	61
5. Kondisi fisik rumah responden	63
6. Hasil pelaksanaan raskin	65
7. Penerima Raskin Sesuai Kriteria BPS.....	67
8. Berita Acara Serah Terima	69
9. Kartu Raskin.....	70
10. SK Penetapan RTS-PM.....	71
11. Indikator Keberhasilan Raskin	72
12. Sketsa Wilayah Kelurahan VI Suku.....	73

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN RASKIN (BERAS UNTUK
KELUARGA MISKIN) (Studi Kasus : Kelurahan VI Suku Kecamatan
Lubuk Sikarah Kota Solok)**

ABSTRAK

Penelitian tentang Efektifitas Pelaksanaan Raskin (Beras Untuk Keluarga Miskin) di Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok. Waktu penelitian di lapangan terhitung selama dua bulan yakni dari bulan Desember 2010 sampai bulan Januari 2011. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan program Raskin dan menganalisa efektifitas program Raskin di Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok. Metode yang digunakan adalah Studi Kasus, dimana yang menjadi sumber data Primer adalah instansi terkait dan RTS-PM Raskin, sedangkan untuk sumber data sekunder diperoleh dari insatansi terkait. Untuk tujuan pertama digunakan metode deskriptif kualitatif dan untuk tujuan kedua digunakan metode deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian dilapangan diperoleh bahwa proses pelaksanaan program Raskin sudah berjalan dengan baik. Proses pelaksanaannya sesuai dengan proses pelaksanaan yang ada di Pedoman Umum Raskin. Secara umum efektifitas pelaksanaan Raskin sudah berjalan dengan baik, dengan indikator keberhasilan tepat sasaran 57%, tepat harga 100%, tepat jumlah 100%, tepat waktu 69%, tepat administrasi 69%, dan tepat kualitas 33%. Agar proses pelaksanaan Program Raskin dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan indikator keberhasilannya, maka disarankan agar pemerintah memverifikasi data mengenai jumlah RTS-PM raskin, menambah jumlah pagu Raskin dengan menyediakan dana Raskin daerah, menyediakan dana talangan dan meningkatkan kualitas layanan. Juga diperlukan kerjasama antara pihak Pemerintah Daerah, Perum Bulog, instansi terkait lainnya dan masyarakat dalam mengevaluasi keefektifan program Raskin agar dapat menghindari penyimpangan dilapangan.

**EFFECTIVENESS OF RASKIN (RICE FOR THE POOR FAMILY)
DISTRIBUTION (Case Study in Kecamatan VI Suku Lubuk Sikarah,
Solok Municipality)**

ABSTRACT

This case study aims to describe raskin distribution process and to analyze its effectiveness. The effectiveness is observed from appropriate of target group, of price, of volume, of time, of administration and of quality. Both qualitative and quantitative data analysis were done in using both primary and secondary data collected from all related offices and organizations.

It is found that raskin distribution process follows the provided general guidelines. The distribution effectiveness is very good. Appropriate level of target group is 57%, of price is 100%, of volume is 100%, of time is 69%, of administration is 69% and of quality is of 33%.

Although distribution effectiveness is good, it is ample space for further improvement. So, government offices need to verify target group data, to add raskin volume, to provide more budget for distribution, and to distribute higher rice quality. In order to avoid distortion, local government has to collaborate closely with Bulog, and other relevant agencies and communities, especially during the evaluation of raskin distribution .

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu SDM yang memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal ini sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, dan status gizi yang baik ditentukan oleh jumlah asupan pangan yang dikonsumsi. Apabila gizi kurang dan gizi buruk terus terjadi dapat menjadi faktor penghambat dalam pembangunan nasional. Menurut Suryana (2004) *dalam* Hendra (2008) ketahanan pangan dan gizi menghendaki pasokan dan harga pangan yang stabil, merata dan berkelanjutan, serta kemampuan rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup, serta mengelolanya dengan baik agar setiap anggotanya memperoleh gizi yang cukup dari hari ke hari.

Menurut Hardyansyah (1999) *dalam* Handewi, dkk (2008) kejadian rawan pangan dan gizi buruk mempunyai makna politis yang negatif bagi penguasa. Bahkan di beberapa Negara berkembang, krisis pangan dapat menjatuhkan pemerintahan yang sedang berkuasa. Kejadian rawan pangan di tingkat rumah tangga dengan proporsi cukup besar masih ditemukan di daerah-daerah dengan ketahanan pangan tingkat regional (provinsi) maupun tingkat nasional terjamin. Oleh karena itu, pencapaian ketahanan pangan tingkat rumah tangga dan individu merupakan sasaran pembangunan ketahanan pangan suatu negara.

Hermanto (2002) *dalam* Handewi (2008) juga menyatakan bahwa gejolak harga pangan (beras) berdampak negatif terhadap daya beli konsumen serta menghambat rumah tangga untuk mengakses pangan yang dibutuhkan. Di tingkat produsen, gejolak harga dan penurunan harga gabah pada saat panen raya berdampak pada menurunnya pendapatan dan daya beli petani. Dengan demikian, ketidakstabilan harga beras berdampak pula terhadap daya beli dan akses petani terhadap pangan

khususnya yang berstatus *netconsumer*. Oleh karena itu, kebijakan stabilisasi harga (beras) merupakan salah satu faktor penentu tercapainya ketahanan pangan.

Undang-undang No. 7 tahun 1996 tentang pangan menyatakan bahwa pangan sebagai kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi rakyat Indonesia harus senantiasa tersedia cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Menurut Sastraatmadja (2006) dalam Muliati (2008), pangan merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi manusia karena berguna dalam mempertahankan kehidupannya. Oleh karena itu upaya pemenuhannya merupakan salah satu upaya yang sangat fundamental. Pada umumnya sebagian besar penduduk Indonesia mengkonsumsi beras. Arifin (2006) menyatakan bahwa keadaan yang demikian akan membuat situasi ketersediaan, stabilitas, dan aksesibilitas pangan di Indonesia akan berada pada tahap yang mencemaskan. Dimana, produksi beras Indonesia tidak akan mampu mengejar pertumbuhan penduduk dan akibatnya terjadi kerawanan pangan dan gizi buruk pada anak dan balita yang disebabkan karena rendahnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, untuk mendorong daya beli masyarakat khususnya keluarga miskin maka lahirlah suatu program subsidi pangan terarah yang kemudian disebut Program Raskin (beras untuk keluarga miskin) (Bulog, 2010).

Tujuan program Raskin menurut Bulog (2010) adalah untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangan (beras) keluarga miskin dan sekaligus diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, selain itu juga untuk meningkatkan/membuka akses pangan keluarga miskin dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat pada tingkat harga bersubsidi dengan jumlah yang telah ditentukan.

Lahirnya program raskin ini tidak terlepas dari krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 yang menyebabkan nilai tukar Rupiah terhadap USD merosot tajam dan sulit dikontrol. Selanjutnya itu telah berimbas kesejumlah sektor, terutama konstruksi dan manufaktur. Dalam situasi itulah, Pemerintah melakukan intervensi pasar beras besar-besaran untuk menurunkan harga. Awalnya pemerintah

memperkenalkan program OPK (Operasi Pasar Khusus) beras. Tujuannya adalah beras dengan harga bersubsidi disalurkan ke rumah tangga miskin sebagai sasarannya. Pada tahun 2002, program OPK ditransform ke Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin). Pengantian nama program menjadi penting, dengan nama Raskin program menjadi yang jelas, maka program itu dapat langsung terarah ke targetnya, yaitu keluarga miskin. Tujuan kedua program tersebut tidak jauh berbeda, yaitu untuk meningkatkan daya beli rumah tangga miskin dan rumah tangga rawan pangan (Sawit, 2002).

Banyaknya jumlah penduduk miskin yang tersebar di berbagai pelosok daerah mengindikasikan perlunya sebuah bantuan program yang berbasis pada masyarakat miskin. Jumlah penduduk Miskin di Sumatera Barat pada tahun 2010 menurut data BPS adalah sebanyak 430.024 jiwa yang tersebar diberbagai kota/Kabupaten. Di Kota Solok sendiri jumlah penduduk miskinnya mencapai 3.222 KK dan tersebar diseluruh Kelurahan yang ada dan salah satunya adalah Kelurahan VI Suku. Di lokasi penelitian, jumlah keluarga miskin yang mendapatkan raskin adalah sebanyak 168 KK. Sementara itu sulitnya prosedur pendistribusian Raskin seperti pengadaan beras yang didatangkan dari luar daerah (Pulau Jawa) juga menyebabkan terganggunya efektifitas pelaksanaan Raskin di Kelurahan VI Suku. Tujuan pemerintah untuk memberikan bantuan pada keluarga miskin tidak luput dari penyimpangan, diantaranya seperti ketidaktepatan sasaran penerima raskin, keterlambatan pendistribusian dan rendahnya kualitas beras yang diterima keluarga miskin. Oleh sebab itu efektifitas pelaksanaan Program Raskin harus dievaluasi agar program ini berjalan dengan optimal dan indikator keberhasilan dapat dicapai. Karena jika efektifitas program raskin rendah maka akan berpengaruh kepada kelangsungan hidup keluarga miskin dan akses mereka terhadap pangan (beras).

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk membahas permasalahan ini dan melakukan penelitian dengan judul **“Efektifitas Pelaksanaan Raskin (Beras Untuk Keluarga Miskin). (Studi Kasus: Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2003 dan Intruksi presiden No. 9 tahun 2002, perum Bulog ditugaskan pemerintah untuk melaksanakan tugas pelayanan publik di bidang pembangunan perberasan Nasional, yang meliputi penyaluran beras untuk keluarga miskin (Raskin), pengelolaan cadangan beras Pemerintah dan Pengamanan Harga Pasar Pembelian Pemerintah (HDPP) gabah dan beras dengan melakukan pengadaan beras/gabah dari dalam Negeri. Namun dalam pelaksanaannya program Raskin tidak luput dari berbagai masalah.

Tabor dan Husein (2005) menyatakan bahwa Raskin mengambil porsi cukup besar dalam pengeluaran pembangunan daerah. APBN untuk Program Raskin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2007 mencapai Rp. 6,28 triliun dan naik menjadi Rp. 11, 4 triliun pada tahun 2010. Biaya Program Raskin yang bersumber dari APBN hanya sampai pada titik distribusi. Biaya operasional dari titik distribusi sampai kepada penerima manfaat menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah (APBD). Sebagai penanggung jawab penyaluran beras dari titik distribusi ke penerima manfaat, sebagian pemerintah kabupaten/kota telah mengalokasikan dana APBD untuk pelaksanaan Program Raskin dengan jumlah yang bervariasi. Di Sumatra Barat, pada 2007 semua pemda kabupaten/kota menyediakan dana pendamping Program Raskin.

Namun dalam pelaksanaannya, Program Raskin senantiasa mengalami banyak tantangan dan kendala. SMERU (2008) menyatakan bahwa pelaksanaan Program Raskin masih memiliki kelemahan seperti ketidaktepatan sasaran, ketidaktepatan harga dan ketidaktepatan waktu pendistribusian. Sementara itu, berdasarkan hasil penelitian Sari (2007) kualitas beras yang diterima keluarga miskin juga kurang baik. Tidak terkecuali di daerah penelitian, berdasarkan survei pendahuluan dilapangan diketahui bahwa jumlah pagu yang disediakan oleh Pemerintah Pusat tidak sesuai dengan jumlah keluarga miskin yang ada di Kelurahan VI Suku, adanya keterlambatan dalam pendistribusian dan kualitas beras yang kurang baik. Hal tersebut memungkinkan terjadinya ketidakefektifan dalam pelaksanaan Program Raskin di Kelurahan VI Suku. Berdasarkan uraian diatas dirasa perlu adanya suatu

penelitian yang mengkaji tentang efektifitas pelaksanaan Program Raskin, yang akan diketahui hasil akhirnya berupa tingkat efektifitas Program yang diukur melalui indikator keberhasilannya. Karena penelitian ini mengukur tingkat efektifitas pelaksanaan Program Raskin, diharapkan dari hasil penelitian ini juga akan muncul penyebab belum efektifnya pelaksanaan Program Raskin tersebut. Keefektifitasan Program Raskin menjadi penting karena menyangkut kehidupan masyarakat miskin, yang mana dapat membantu masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan, mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan juga Raskin dapat menstabilkan harga pangan (beras).

Dengan ditemukannya masalah dalam penyaluran beras Raskin dilapangan, maka muncullah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan beras Raskin di Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok.
2. Bagaimana efektifitas pelaksanaan program Raskin di Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan proses pelaksanaan Program Raskin di Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok.
2. Menganalisa efektifitas pelaksanaan program raskin di Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok berdasarkan indikator keberhasilannya.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi aparat Pemerintahan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi Pemerintah Kota Solok dalam menyusun rencana pembangunan dan program penanggulangan kemiskinan di masa yang akan datang

2. Bagi Rumah Tangga Penerima Manfaat (RTS-PM), diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai keefektifitasan pelaksanaan raskin dan manfaat yang dapat mereka terima dari program Raskin.
3. Mahasiswa dan atau peneliti selanjutnya, penulis juga berharap penelitian ini dapat menambah bahan referensi dalam membahas lebih dalam tentang efektifitas Program Raskin.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Ketahanan Pangan

Konsep ketahanan pangan sebagai terjemahan istilah *food security* difokuskan pada ketersediaan pangan di tingkat nasional maupun internasional, terutama padi-padian (Baliwati, 2004). Makna yang terkandung didalamnya adalah setiap orang pada setiap saat memiliki aksesibilitas secara fisik dan ekonomi terhadap pangan secara cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan agar dapat hidup produktif dan sehat.

Undang-Undang Pangan No.7 Tahun 1996 memberikan definisi ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Program ketahanan pangan telah dilakukan sejak zaman Presiden Soekarno dengan nama Program Berdikari, begitu pula zaman Presiden Soeharto dan dikenal dengan Program Swasembada Pangan (Baliwati, 2004).

Secara teoritis, terdapat dua tipe ketidaktahanan pangan, yaitu kronis dan transitori. Ketidaktahanan kronis adalah ketidakcukupan pangan secara menetap akibat ketidakmampuan rumahtangga untuk memperoleh pangan yang dibutuhkan melalui pembelian di pasar atau melalui produksi sendiri. Kondisi ini berakar pada kemiskinan. Ketidaktahanan pangan transitori adalah penurunan akses terhadap pangan yang dibutuhkan rumahtangga secara temporer. Hal ini disebabkan adanya bencana alam sehingga menyebabkan ketidakstabilan harga pangan, produksi atau pendapatan (Baliwati, 2004).

Berdasarkan pengertian dan konsep tersebut di atas maka para ahli sepakat bahwa ketahanan pangan minimal mengandung empat unsur pokok yaitu:

1. Kecukupan ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan dalam rumah tangga yang dipakai dalam pengukuran mengacu pada pangan yang cukup dan tersedia dalam jumlah yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Penentuan jangka waktu ketersediaan makanan pokok di perdesaan (seperti daerah penelitian) biasanya dilihat dengan mempertimbangkan jarak

antara musim tanam dengan musim tanam berikutnya. Perbedaan jenis makanan pokok yang dikonsumsi antara dua daerah membawa implikasi pada penggunaan ukuran yang berbeda.

2. Stabilitas dan ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun. Stabilitas ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga diukur berdasarkan kecukupan ketersediaan pangan dan frekuensi makan anggota rumah tangga dalam sehari.
3. Aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan.
Indikator aksesibilitas/keterjangkauan dalam pengukuran ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dilihat dari kemudahan rumah tangga memperoleh pangan, yang diukur dari pemilikan lahan serta cara rumah tangga untuk memperoleh pangan. Akses yang diukur berdasarkan pemilikan lahan dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori:
 - (1) Akses langsung (*direct access*), jika rumah tangga memiliki lahan sawah/ladang
 - (2) Akses tidak langsung (*indirect access*) jika rumah tangga tidak memiliki lahan sawah/ladang.
4. Kualitas dan keamanan pangan, kualitas/keamanan jenis pangan yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi. Ukuran kualitas pangan seperti ini sangat sulit dilakukan karena melibatkan berbagai macam jenis makanan dengan kandungan gizi yang berbeda-beda., sehingga ukuran keamanan pangan hanya dilihat dari 'ada' atau 'tidak'nya bahan makanan yang mengandung protein hewani dan/atau nabati yang dikonsumsi dalam rumah tangga. Karena itu, ukuran kualitas pangan dilihat dari data pengeluaran untuk konsumsi makanan (lauk-pauk) sehari-hari yang mengandung protein hewani dan/atau nabati. Berdasarkan kriteria ini rumah tangga dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu:
 - a. Rumah tangga dengan kualitas pangan baik adalah rumah tangga yang memiliki pengeluaran untuk lauk-pauk berupa protein hewani dan nabati atau protein hewani saja.
 - b. Rumah tangga dengan kualitas pangan kurang baik adalah rumah tangga yang memiliki pengeluaran untuk lauk-pauk berupa protein nabati saja.

- c. Rumah tangga dengan kualitas pangan tidak baik adalah rumah tangga yang tidak memiliki pengeluaran untuk lauk-pauk berupa protein baik hewani maupun nabati.

Walaupun pangan tersedia cukup di tingkat nasional dan regional, tetapi jika akses individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya tidak merata, maka ketahanan pangan masih dikatakan rapuh. Akses terhadap pangan, ketersediaan pangan dan resiko terhadap akses dan ketersediaan pangan tersebut merupakan determinan yang esensial dalam ketahanan pangan.

2.2. Kemiskinan

2.2.1. Pengertian Kemiskinan

Ketika perekonomian berkembang di suatu kawasan (negara atau kawasan tertentu yang lebih kecil), terdapat lebih banyak pendapatan untuk dibelanjakan, yang jika terdistribusi dengan baik diantara penduduk di kawasan tersebut akan mengurangi kemiskinan.

Irawati, dkk. (2005) juga menyatakan bahwa kemiskinan bagi masyarakat petani merupakan wujud dari ketidakcukupan, ketidakmampuan dan ketidakberdayaannya dalam memenuhi segi kebutuhan tertentu menurut sistem nilai yang dianut masyarakat. Pemberdayaan merupakan upaya memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki dalam menentukan pilihan kegiatan untuk menjadi lebih baik dengan memberikan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi melalui serangkaian proses.

Seseorang dapat dikatakan miskin atau hidup dalam kemiskinan jika dalam instrumen pendapatan atau aksesnya terhadap barang dan jasa relatif rendah dibandingkan orang lain. Secara absolut, seseorang dinyatakan miskin apabila tingkat pendapatan atau standar hidupnya secara absolut berada dibawah tingkat subsisten (Anonim (2004) dalam Muliati (2008)).

Kemiskinan berasal dari bahasa Arab yaitu, "sakana" yang berarti pasif, statis, diam, tenang, atau tidak bergerak. Para ahli memiliki pandangan berbeda dalam menterjemahkan kemiskinan. Menurut Suparlan (1993) dalam Yusmar (2001),

kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada segolongan orang dibandingkan dengan standar hidup yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

2.2.2. Pembagian dan Kriteria Kemiskinan

Para ahli membagi kemiskinan kedalam beberapa kategori:

1. Didasarkan penyebab kemiskinan, Pakpahan (1993) membagi kemiskinan dalam tiga kategori:
 - a. Kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh struktur yang membelenggu masyarakat untuk maju secara keseluruhan.
 - b. Kemiskinan natural, yaitu kemiskinan sebagai akibat dari terbatasnya sumber daya alam yang dimiliki masyarakat.
 - c. Kemiskinan relatif, yaitu kemiskinan disebabkan oleh situasi komperasi antara satu individu dengan individu, kelompok masyarakat dengan individu, kelompok atau masyarakat lain.
2. Soemodiningrat (1999) dalam Yusmar (2001) membagi kemiskinan menjadi empat bagian, yakni:
 - a. *Persistent poverty*, kemiskinan yang kronis, kemiskinan turun-temurun.
 - b. *Ciclical poverty*, kemiskinan yang terjadi diakibatkan oleh siklus ekonomi.
 - c. *Seasonal poverty*, kemiskinan disebabkan pengaruh musim yang ada.
 - d. *Accidental poverty*, kemiskinan disebabkan oleh faktor bencana alam yang menimpa.
3. Esmara (1986) membagi menjadi dua macam kemiskinan berdasarkan ukuran pendapatan dan kelompok miskin:
 - a. Kemiskinan absolut, yaitu kemiskinan yang dikarenakan tingkat pendapatan lebih rendah dari garis kemiskinan absolut yang ditetapkan atau merupakan penduduk tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan.
 - b. Kemiskinan relatif, yaitu kemiskinan yang didasarkan pada perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat.

Para ahli dan instansi yang ada memiliki patokan yang berbeda-beda dalam penentuan kriteria kemiskinan.

1. Menurut Alatas (2008), kriteria atau parameter kemiskinan yang digunakan oleh suatu negara tidak selalu bisa digunakan oleh negara lain. Oleh karena itu, dibuatlah garis kemiskinan internasional dalam bentuk nilai tukar PPP (*purchasing power parity*) 1 dolar AS dan 2 dolar AS, sebagai standar internasional yang bisa diterapkan di seluruh negara. Dari perhitungan tersebut ditemukan bahwa 7,4% penduduk Indonesia mengkonsumsi di bawah PPP US\$ 1 per hari dan 49% di bawah PPP 2 dolar AS per hari. Besarnya selisih persentase nilai PPP 1 dolar AS dengan nilai PPP 2 dolar AS mencerminkan tingginya kerentanan kemiskinan. Sejumlah besar penduduk Indonesia, hidup diantara PPP 1 dolar AS dan PPP 2 dolar AS atau setara dengan PPP 1,5 dolar AS per hari, dan itu menandakan kerentanan kemiskinan di Indonesia.
2. Esmara (1986) mengukur kemiskinan berdasarkan ukuran beras yang ditambahkan dengan pengeluaran gizi, kalori dan protein dengan ukuran 125 kg beras, Rp. 1.680,-. Gizi minimum 1900 kalori dan 40 gram protein/orang.
3. Sajogyo (1978) membedakan kemiskinan menjadi tiga tingkatan dengan ukuran setara beras, yaitu:
 - a. Cukup, apabila pendapatan lebih dari 480 kg beras/orang/tahun dipedesaan dan lebih dari 720 kg beras/orang/tahun diperkotaan.
 - b. Miskin, apabila penghasilan keluarga setara 240-320 kg beras/orang/tahun dipedesaan dan 360-480 kg beras/orang/tahun diperkotaan.
 - c. Sangat miskin, apabila keluarga mempunyai penghasilan 240 kg beras/orang/tahun dipedesaan dan 360 kg beras/orang/tahun diperkotaan.
4. Djoyohadi Kusumo (1995) telah menyempurnakan ukuran Bank Dunia yang melihat pendapatan sebagai ukuran kemiskinan, yaitu US\$ 50/kapita/bulan untuk pedesaan dan US\$ 75/kapita/bulan untuk perkotaan (jika kurs menurut tahun 1995 US\$ 1 antara Rp. 2000 – Rp.2500, maka diperoleh angka

- Rp. 100.000 – Rp.125.000 / kapita/bulan untuk pedesaan dan Rp. 150.000 – Rp. 187.500 /kapita/bulan) untuk daerah perkotaan.
5. BPS (1984) membagi kemiskinan berdasarkan 14 kriteria, yaitu:
- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang
 - b. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
 - c. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
 - d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
 - e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
 - f. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
 - g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
 - h. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
 - i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
 - j. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
 - k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
 - l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 0, 5 ha. Buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan.
 - m. Pendidikan tertinggi kepala kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD.
 - n. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000, seperti: sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

2.2.3. Rumah Tangga Miskin (RTM)

Rusli (1995) dalam Yakub (2005) menyatakan bahwa sebuah keluarga disebut miskin dapat dilihat dari identifikasi yaitu sebagai buruh (tanpa modal), petani/nelayan/pengrajin (skala kecil). Rumah tangga miskin biasanya menerapkan sistem nafkah ganda untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun indikator kemiskinan mereka adalah berupa usaha skala kecil/tanpa modal, serta peran kerja wanita dan anak sebagai pencari nafkah menonjol.

Menurut BPS (1984) ciri-ciri rumah tangga miskin adalah:

1. Rumah tangga miskin umumnya hanya memiliki satu orang pekerja.
2. Sebagian besar tempat tinggal belum memenuhi persyaratan kesehatan yang memadai.
3. Sebagian besar memiliki lahan pertanian yang relatif sempit.
4. Tingkat pendidikan kepala rumah tangga umumnya masih rendah.
5. Rata-rata jam kerja umumnya masih rendah jika dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin.
6. Status pekerjaan 70% adalah petani.

Dalam kaitannya dengan kemiskinan, ada istilah penduduk/masyarakat miskin dan penduduk/masyarakat yang tidak miskin. Untuk membedakan keduanya digunakan garis kemiskinan dalam menentukannya (*poverty line*). Kata masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu syaraka yang artinya ikut serta atau berpartisipasi. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau saling berinteraksi, dimana satu kesatuan manusia ini mempunyai prasarana melalui apa warga-warga dapat saling berinteraksi. Adapun ikatan yang membuat satu kesatuan manusia itu menjadi satu kesatuan masyarakat adalah pola tingkah laku yang khas mengenai semua faktor kehidupannya dalam batas kesatuan ini, dengan arti kata pola itu harus bersifat mantap dan kontinu sehingga pola khas itu harus sudah menjadi adat istiadat yang khas.

Dalam upaya untuk memudahkan atau menemuknenali penduduk yang tergolong miskin dalam program pengentasan kemiskinan maka ditetapkan lah instrumen-instrumen yang mengacu kepada lima aspek kebutuhan pokok yaitu

pangan, papan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Instrumen itu terdiri dari indikator sebagai berikut: (1) Pakaian seadanya; (2) Pendapatan rendah; (3) Mata pencarian tidak tetap; (4) Tidak mempunyai lahan usaha/punya tapi kurang; (5) Tidak punya hewan ternak sendiri; (6) Tidak punya alat produksi; (7) Pendidikan rendah; (8) Tidak memiliki keterampilan; (9) Pendidikan anak-anak terlantar, putus sekolah; (10) Sering sakit, gizi rendah, berobat ke dukun; (11) Rumah tangga tidak layak huni, tidak sehat; (12) MCK ke sungai/tidak memenuhi syarat kesehatan; (13) Memiliki keluarga cacat fisik/mental; (14) Jumlah tanggungan keluarga lebih dari lima orang; (15) Tempat tinggal terpencil jauh dari pusat pelayanan; (16) Status tanah dan rumah menumpang/kontrak; (17) Lingkungan tempat tinggal kumuh/sampah bertebaran.

Sedikitnya terdapat sembilan dimensi kemiskinan yang perlu dipertimbangkan (Sudaryanto dan Rusastra, 2006), yaitu:

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang dan perumahan).
2. Aksesibilitas ekonomi yang rendah terhadap kebutuhan dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi yang baik, air bersih dan transportasi).
3. Lemahnya kemampuan untuk melakukan akumulasi kapital.
4. Rentan terhadap goncangan faktor eksternal yang bersifat individual maupun missal.
5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan penguasaan sumber daya alam.
6. Ketidakterlibatan dalam kegiatan social kemasyarakatan.
7. Terbatasnya akses terhadap kesempatan kerja secara berkelanjutan.
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
9. Mangalami ketidakmampuan dan ketidakberuntungan social.

Karakteristik penduduk miskin secara lebih spesifik, diantaranya dicirikan oleh beberapa hal (Pasaribu, 2006) sebagai berikut:

1. Masyarakat miskin sebagian besar tinggal di pedesaan dengan mata pencarian dominan berusaha sendiri di sektor pertanian (60%).
2. Sebagian besar (60%) penduduk berpenghasilan rendah mengkonsumsi energy kurang dari 2.100 k.kal/hari. Berdasarkan indikator silang proporsi pengeluaran

pangan (>60%) dan kecukupan gizi (<80%), diperoleh proporsi rumah tangga rawan pangan nasional mencapai sekitar 30%.

3. Penduduk miskin dengan tingkat SDM yang rendah, umumnya tinggal di wilayah dengan karakteristik marjinal, dukungan infrastruktur terbatas, dan tingkat adopsi teknologi yang rendah.

2. 3. Program Raskin

2. 3. 1. Latar Belakang Program Raskin

Bulog, (2010) menyatakan bahwa berbagai upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan secara terpadu dan simultan oleh pemerintah bersama masyarakat. Program penanggulangan kemiskinan terdiri dari tiga klaster : Klaster I, Bantuan dan Perlindungan Sosial, yaitu: Program Raskin, Jamkesmas, PKH, Beasiswa Siswa Miskin. Klaster II, Pemberdayaan Masyarakat dengan Program PNPM Mandiri dan klaster III, Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan kredit usaha rakyat (KUR).

Secara Nasional, program penanggulangan kemiskinan di koordinasikan oleh Menko Kesra dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tingkat pusat. Sedangkan di tingkat Propinsi dikoordinasikan oleh Gubernur dan kabupaten/kota dikoordinasikan oleh bupati/walikota masing-masing.

Pada awalnya pemerintah memperkenalkan program OPK (Operasi Pasar Khusus) beras. Tujuannya adalah beras dengan harga bersubsidi disalurkan ke rumah tangga miskin sebagai sasarannya, mula-mula hanya 10 kg/KK/bulan, kemudian ditambah menjadi 20 kg/KK/bulan. Mereka cukup membayar Rp 1.000/kg, kiri-kira seperempat dari harga beras di pasar akhir 1998. Sejak Agustus 1998, program ini diperluas ke seluruh Provinsi di tanah air, setelah diuji coba di beberapa Provinsi pada Juli 1998.

Ini adalah satu-satunya program yang dirancang dan dibiaya APBN, sebagai respons utama Pemerintah pada priode krisis. Kemudian atas prakarsa Bank Dunia (BD) dengan dana pinjaman, BD memperkenalkan program JPS (Jaring Pengaman Sosial). Konsep BD itu dirancang dibanyak negara berkembang untuk mengatasi

masalah utama karena: (i) perlunya penyesuaian struktural (*structural adjustment programs*), semacam insentif untuk melakukan reformasi ekonomi dan berkurangnya campur tangan pemerintah di pasar, (ii) stabilisasi ekonomi makro, sehingga dengan itu pemerintah dapat mendisiplinkan bidang fiskal dan moneter, (iii) krisis ekonomi, sehingga diperlukan penyesuaian jangka pendek, memperkecil dampak buruk terhadap kelompok miskin dan pengangguran. Singkatnya, program JPS dirancang untuk tujuan mencegah munculnya dampak buruk dari bertambahnya pengangguran dan orang miskin baru, serta penderitaan orang miskin kronis.

Selanjutnya, program OPK diintegrasikan dalam program JPS, namun pendanaannya tetap dari APBN. Pada 2002, program OPK ditransform ke Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin). Pengantian nama program menjadi penting. Dengan nama Raskin program yang jelas, maka program itu dapat langsung terarah ke targetnya, yaitu keluarga miskin. Tujuan kedua program itu tidak jauh berbeda, yaitu untuk meningkatkan daya beli rumah tangga miskin dan rumah tangga rawan pangan.

Ditahun 2010 ini setiap RTM mendapatkan 15 kg Raskin dengan harga Rp. 1.600,-/kg/KK.

2. 3. 2. Dasar Hukum Program Raskin

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pelaksanaan Program Raskin adalah (Bulog, 2010):

1. Undang-undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat.
2. Undang undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
3. Undang-undang No. 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
4. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang No. 47 Tahun 2009, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010.
6. Undang-undang No. 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 8 tahun 1985.

7. Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2004 tentang Ketahanan Pangan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2003, tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG.
9. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, tentang pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Presiden RI No. 13 Tahun 2009, tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
11. Peraturan Presiden RI No. 21 tahun 2009, tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010.
12. Inpres No. 8 tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan Nasional.
13. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang “perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah”.
14. Kepmenko Kesra No. 35 tahun 2008 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat.

2.3.3. Pengelolaan Raskin

Prinsip pengelolaan Raskin menurut Bulog (2010):

1. Keberpihakan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin. Bermakna mengusahakan RTS-PM Raskin dapat memperoleh beras kualitas baik, cukup sesuai alokasi dan terjangkau.
2. Transparansi
Yaitu membuka akses informasi kepada lintas pelaku raskin terutama masyarakat miskin yang harus tahu, memahami dan mengerti adanya kegiatan Raskin serta memiliki kebebasan untuk melakukan pengendalian secara mandiri.
3. Partisipasi
Yaitu mendorong masyarakat berperan secara aktif dalam setiap tahapan Raskin mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan dan pengendalian.
4. Akuntabilitas
Yaitu mengingatkan bahwa setiap pengelolaan kegiatan Raskin harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua

pihak yang berkompeten sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin tahun 2010 dipandang perlu mengatur pelaksana program raskin. Untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggung jawabannya, dibentuk Tim Koordinasi Raskin di tingkat pusat sampai kecamatan dan pelaksana Distribusi Raskin di tingkat desa/kelurahan serta Tim lainnya sesuai kebutuhan yang diatur dan ditetapkan melalui keputusan pejabat yang berwenang.

Guna mendukung pelaksanaan Raskin maka dibentuklah Tim Raskin tingkat Pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota. Tim Raskin tingkat Pusat terdiri dari kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, BAPPENAS, Departemen Pertanian, Departemen Perdagangan, BPS dan Perum Bulog. Sedangkan Tim Raskin tingkat Provinsi adalah pelaksana program Raskin di Provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Gubernur. Sementara itu, Tim Raskin Kabupaten/Kota adalah pelaksana Program Raskin di Kabupaten/Kota yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Disamping itu, Kelompok Kerja (POKJA) Raskin yaitu Kelompok Kerja Distribusi beras untuk rumah tangga miskin terdiri dari Aparat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Institusi kemasyarakatan setempat termasuk TP-PKK yang ditunjuk oleh Camat, Kades/Lurah dan Perangkat wilayah yang dibantu Lembaga Kemasyarakatan dan Anggota Masyarakat lain bertanggung jawab dan bertugas menyampaikan Raskin kepada RTM (Bulog, 2010).

2.3.4. Pagu Raskin

Pagu Raskin Nasional dialokasikan ke provinsi di seluruh Indonesia oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat berdasarkan data RTS dari BPS dan kuantum Pagu Raskin Nasional sesuai dengan undang-undang No. 47 tahun 2009 tentang APBN 2010.

Pagu raskin propinsi dialokasikan ke Kabupaten/Kota oleh Tim Koordinasi Raskin Propinsi yang dituangkan dalam keputusan Gubernur. Penetapan pagu Raskin Kabupaten/Kota didasarkan pada:

1. Pagu Raskin Propinsi
2. Data RTS Kabupaten/Kota dari BPS

Pagu Raskin Kecamatan /Kelurahan/Desa ditetapkan Oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota dengan keputusan Bupati/Walikota. Penetapan pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan didasarkan pada:

1. Pagu Raskin Kabupaten/Kota
2. Data RTS kecamatan/Desa/Kelurahan dari BPS

Pagu Raskin disuatu wilayah yang tidak didistribusikan tidak dapat dialihkan ke wilayah lain. Apabila pagu Raskin di suatu wilayah tidak dapat diserap sampai dengan 31 Desember 2010, maka sisa pagu tersebut tidak dapat disalurkan pada tahun 2011 (Bulog, 2010).

2.3.5. Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (DPM-PM) Raskin

RTM yang berhak mendapatkan Raskin adalah RTM yang terdaftar dalam PPLS 08 BPS sebagai RTS di Desa/Kelurahan. Dalam rangka mengakomodir adanya dinamika RTM di tingkat Desa/Kelurahan, maka perlu dilakukan Mudes/Muskel untuk menetapkan kebijakan lokal:

1. Melakukan verifikasi nama RTS hasil PPLS 08 BPS yang sudah tidak layak atau pindah alamat keluar desa/Kelurahan dapat diganti oleh RTM yang belum terdaftar sebagai RTS. Sedangkan untuk RTS yang meninggal dunia diganti oleh sala satu anggota rumah tangganya. Apabila RTS yang meninggal dunia merupakan rumah tangga tunggal (tidak memiliki anggota rumah tangga) dapat digantikan RTM yang belum terdaftar.
2. RTM yang dinilai layak sesuai kriteria BPS dan belum terdaftar sebagai RTS hasil PPLS 08 BS, dapat diberikan Raskin.

RTS BPS yang telah diverifikasi dan hasil mudes/muskel yang memutuskan nama rumah tangga penerima manfaat Raskin tersebut dimasukkan dalam daftar RTS-PM sesuai midel DPM-1, yang ditetapkan oleh Kepala Desa/lurah dan disahkan oleh Camat. Data RTS-PM Raskin di Desa/kelurahan direkap di tingkat

kecamatan dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota (Bulog, 2010).

2.3.6. Penetapan Titik Distribusi (TD)

Menurut Bulog (2010) dalam Pedoman Umum Raskin, Titik Distribusi yang merupakan tempat penyerahan beras Raskin antara satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin pada dasarnya ditetapkan di kantor desa/kelurahan atau di lokasi lain atas kesepakatan tertulis antara pemerintah Kabupaten/Kota dan Divre/Subdivre/Kansilog Perum Bulog setempat, yaitu:

1. Bagi Divre/Subdivre/Kansilog yang ingin meningkatkan pelayanan, maka TD dapat dialihkan dari kantor desa/kelurahan ke SLS Dusun/RW, atau
2. Bagi Divre/Subdivre/Kansilog yang tidak dapat menjangkau kantor desa/kelurahan, maka TD dapat dialihkan dari kantor desa/kelurahan ke kantor kecamatan atau tempat lainnya.

2. 3.7. Mekanisme Distribusi

Pendistribusian beras dari Gudang BULOG ke TD di desa/kelurahan atau tempat lain yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Divre/Subdivre/Kansilog Perum Bulog adalah sebagai berikut (Bulog, 2010):

1. Bupati/Walikota mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada kadivre/Kasubdivre/KaKansilog berdasarkan aloksi pagu Raskin dan RTM Penerima Manfaat Raskin masing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
2. Pada waktu beras akan didistribusikan ke TD, Kadivre/Kasubdrive Kakansilog Perum Bulog berdasarkan SPA menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan/desa/Kelurahan kepada Satker Raskin. Apabila terdapat desa/Kelurahan yang menunggu pembayaran HB pada periode sebelumnya, maka penerbitan SPPB/DO untuk desa/kelurahan tersebut ditangguhkan sampai ada pelunasan.

3. Berdasarkan SPPB/DO, Satker Raskin mengambil beras di Gudang penyimpanan Perum Bulog, mengangkut dan menyerahkan beras Raskin kepada Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi.
4. Kualitas beras yang diserahkan harus sesuai dengan kualitas standar beras raskin. Apabila terdapat beras yang tidak sesuai standar, maka Pelaksanaan Distribusi Raskin langsung mengembalikan beras kepada Satker Raskin untuk ditukar/diganti dengan beras yang standar.
5. Pelaksanaan penyerahan/penjualan beras kepada RTS-PM Raskin pemegang Kartu Raskin atau bukti lain yang ditetapkan setempat, dilakukan oleh salah satu dari tiga Pelaksana Distribusi Raskin, yaitu Pokja, Wardes dan Pokmas. Realisasi pelaksanaan penjualan beras dibuatkan daftar penjualan dan pembayaran harga beras (HPB) sesuai model DM-2. Daftar penjualan beras ditandatangani oleh Pelaksana Distribusi Raskin dan diketahui oleh Kepala desa/lurah.
6. Penyerahan beras di Titik Distribusi dituangkan dalam berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Satker Raskin dan Pelaksana Distribusi yang menerima Beras Raskin serta diketahui oleh Kepala Desa/Lurah/Camat atau pejabat yang ditunjuk dengan nama, tanda tangan dan stempel.
7. Satker Raskin membuat rekapitulasi BAST di setiap kecamatan sesuai model MBA-0 yang ditandatangani Satker Raskin dan Camat atau pejabat yang ditunjuk dengan nama, tanda tangan dan stempel.
8. Divre/Subdivre/Kansilog Perum Bulog membuat rekapitulasi MBA-0 di setiap Kabupaten/Kota sesuai model MBA-1 dan ditandatangani oleh Divre/Subdivre/Kansilog Perum Bulog dan Bupati/Walikota atau pejabat lain yang berwenang dengan nama, tanda tangan dan stempel.
9. Pembuatan MBA-1 dilakukan secepatnya atau secara periodik yaitu:
 - a. Realisasi distribusi raskin tanggal 1-15 dibuat pada tanggal 16 bulan yang bersangkutan.
 - b. Realisasi distribusi raskin tanggal 16-31 dibuat pada tanggal 1 bulan berikutnya.

10. Setelah MBA-1 selesai ditandatangani segera dikirimkan ke divre dilampiri dengan fotocopy SPA dan rekap SPPB/DO. Namun sebelum dikirim dilakukan verifikasi untuk mengetahui kelengkapan dana keabsahan dokumen.
11. Berdasarkan MBA-1, dibuat rekapitulasi di tingkat Divre sesuai format MBA-2 dan langsung dikirim ke kantor Pusat Perum Bulog, c/q Divisi Perbendaharaan.

2.3.8. Pengendalian Raskin

Indikator kinerja Program Raskin menurut BULOG (2010) ditunjukkan dengan tercapainya target 6T, yaitu:

1. Tepat Sasaran

Raskin hanya diberikan kepada Rumah Tangga miskin, Penerima Manfaat Raskin merupakan hasil musyawarah Desa yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) dan diberi identitas (kartu raskin atau tanda lain).

2. Tepat Jumlah

Jumlah beras Raskin yang merupakan hak Penerima Manfaat adalah sebanyak 156 kg/RTS/tahun.

3. Tepat Harga

Harga beras Raskin adalah sebesar Rp. 1.600,-kg/RTS/tahun di titik distribusi.

4. Tepat Waktu

Waktu pelaksanaan distribusi beras Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin sesuai dengan rencana distribusi.

5. Tepat Administrasi

Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.

6. Tepat Kualitas

Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan standar kualitas beras Bulog.

Waktu pengawasan pelaksanaan Program Raskin dilakukan secara fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan masyarakat pada prinsipnya terbuka dan dilakukan melalui mekanisme yang berlaku. Jika dilapangan terjadi keluhan, kritik dan saran, masyarakat dapat mengadukannya

melalui UPM BPM di Propinsi, Kabupaten/Kota yang dibentuk. Atau melalui sarana media elektronik antara lain melalui SMS Center Perum Bulog di nomor 08121128564, dengan format pengirimannya yaitu : RAS <spasi> [nama propinsi] <spasi> [nama Kabupaten/Kota] <spasi> [pesan anda].

2.4. Efektifitas Program

Pengimplementasian sebuah program pada dasarnya mengkehendaki tercapainya tujuan dan sasaran yang diharapkan. Maka efektifitas diartikan sebagai ketercapaian tujuan dengan kebutuhan yang telah direncanakan, menurut Steers *dalam* Khairul (2006) efektifitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarnya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta mampu memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya, dengan kata lain apabila sebuah institusi dalam melaksanakan tugasnya dan mencapai sasaran, dapat dikatakan dengan efektif. Kata efektif sering mengacu pada sasaran yang ingin dicapai dalam setiap kegiatan atau program dan efektifitas menjadi salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian petunjuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Sedangkan Maryoto *dalam* Panjaitan (2005) menyatakan bahwa efektifitas dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.

Dari pendapat diatas, dapat dipahami bahwa efektifitas dalam pelaksanaan sebuah program tidak dapat mengabaikan target sasaran yang telah ditetapkan, agar operasionalisasi untuk mencapai keberhasilan dari program yang dilaksanakan dapat tercapai dengan tetap memperhatikan segi kualitas yang diinginkan oleh program. Dalam konsep efektifitas, unsur yang penting adalah pencapaian tujuan yang sesuai dengan apa yang telah disepakati secara maksimal, tujuan merupakan harapan yang dicita-citakan atau suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai oleh serangkaian proses.

Menurut Baenord dan Prawirosentoso *dalam* Syahrial (2008) pengertian efektifitas adalah suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target (sasaran) yang dapat tercapai secara kualitas ataupun secara kuantitas. Sedangkan pengertian kualitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh telah dipenuhi sebagai suatu persyaratan spesifikasi dari harapan yang ingin dicapai, sehingga efektifitas program dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai ketepatan pencapaian target pelaksanaan program kegiatan dalam bentuk:

1. Tepat dalam pencapaian sasaran program
2. Tepat dalam penetapan jumlah beras yang diterima
3. Tepat dalam penetapan harga jual
4. Tepat dalam manajemen waktu pendistribusian
5. Tepat dalam administrasi
6. Tepat dalam kualitas

Selanjutnya efektifitas adalah salah satu alat ukur apakah tujuan tercapai atau tidak. Begitu juga pada program Raskin (beras untuk keluarga miskin) dapat dinilai efektif jika hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah dinyatakan selanjutnya. Keonsep efektifitas lebih luas dan harus meliputi kapasitas suatu program dapat mencapai tujuan operasional secara tepat. Dalam konteks ini efektifitas program adalah seberapa jauh program berjalan dibandingkan dengan seperangkat standarnya sendiri.

2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian Efrida Helmi (2006) menyatakan bahwa perbandingan dalam penentuan kriteria kemiskinan menurut pemerintah dengan kriteria kemiskinan menurut masyarakat itu sendiri pada umumnya sama yaitu fokus pada tingkat pendapatan dan pemenuhan kebutuhan hidup.

Sementara itu menurut hasil penelitian Wijanarko (2005), program Raskin adalah program pemerintah dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan kepada keluarga miskin. Wijanarko (2005) juga menambahkan, bahwa program ini diluncurkan karena masih besarnya kekurangan

gizi makro yang terjadi di masyarakat, dimana jumlah masyarakat yang kekurangan energy dan protein (KEP) di Indonesia mencapai 23 juta orang yang terdiri dari keluarga dengan *deficit energy* dan protein masing-masing 49% dan 26%.

Berdasarkan hasil penelitian Mawardi, dkk, 2007 hal-hal yang sangat penting diperhatikan dalam pelaksanaan program raskin adalah:

1. Kurangnya pagu dibandingkan dengan jumlah RTM menyebabkan ketidaktepatan target, jumlah beras, dan frekuensi penyaluran.
2. Ketidaktepatan target penerima manfaat dipengaruhi oleh lemahnya sosialisasi, kurangpedulian masyarakat, ketidakseriusan pemda, dan kurangnya pagu dibanding jumlah RTM.

2.6. Hipotesis

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Berdasarkan uraian sebelumnya diduga pelaksanaan Program Raskin di Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok belum terlaksana sesuai dengan indikator keberhasilan program raskin.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok. Keputusan Walikota Solok No. 188.45/14/KPTS/WSL/2010 tentang Keputusan Pagu Raskin 2010, dimana jumlah pagu Raskin yang didistribusikan sebanyak 2.085 kg hanya untuk 139 RTS sedangkan RTM yang ada sebanyak 168 KK (Lampiran 2).

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 2 (dua) bulan terhitung bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Januari 2011.

3.2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kasus (*Case Study*) yaitu penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas, yang tujuannya ini adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus ataupun status dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat khas di atas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum (Nazir, 2003).

Kasus yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan penyaluran Raskin di Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok dan analisa tingkat efektifitas pelaksanaannya. Unit analisis penelitian ini adalah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin di Kelurahan VI Suku. Untuk menganalisa efektifitas pelaksanaan Program Raskin informasinya diperoleh dari hasil survei dengan penerima Raskin di Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok.

3.3. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel responden RTS-PM dilakukan secara acak sederhana (*Simple Random Slamping*). Karena jumlah populasi 168 RTM (lebih dari 100),

maka dapat diambil sampel sebesar 10 – 15% atau 20 – 25% (Arikunto, 1993). Pada penelitian ini sampel diambil sebanyak 25% yaitu 42 RTM (Tabel 1).

Tabel 1. Target sampel di Kelurahan VI Suku

No	Uraian	Jumlah
1	Populasi	168 RTM
	RTM penerima Raskin Pusat	139 RTM
	RTM penerima Raskin APBD	29 RTM
2	Sampel	42 RTM

Sumber : Diolah dari data Walikota Solok

Disamping dari RTS-PM, data juga diperoleh dari wawancara dengan pihak terkait dalam penelitian ini yakni sejumlah informan kunci yang berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari BAPPEDA Kota Solok, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Solok, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kelurahan VI Suku dan Perum Bulog Kota Solok.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pengumpulan data primer. Pengumpulan data primer diperoleh dari pengisian daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya dan wawancara mendalam dengan informasi kunci, diantaranya Pihak Kelurahan, Kecamatan, Bulog, dan Responden.

Data primer yang dikumpulkan adalah:

- 1) Informasi umum mengenai daftar penerima raskin di kelurahan VI Suku.
 - 2) Informasi umum mengenai penyaluran raskin di kelurahan VI Suku.
2. Pengumpulan data sekunder. Data sekunder adalah data yang berbentuk tulisan atau dokumen yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang di dapatkan dari sumber lembaga-lembaga terkait dengan penelitian seperti Kecamatan Lubuk Sikarah, Kelurahan VI Suku dan dinas pertanian kota Solok.

Pada pengumpulan data sekunder ini, data yang dikumpulkan meliputi profil daerah penelitaian yang terdiri dari geografi daerah, kependudukan dan penyebaran RTM di kelurahan VI Suku.

3.5. Variabel yang diteliti

Berdasarkan tujuan penelitian ini maka variabel-variabel yang diamati penulis rinci sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan proses pelaksanaan Program Raskin di Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Pendataan RTS-PM.

- 1) Pemilihan RTS-PM
- 2) Penetapan RTS-PM
- 3) Pendistribusian Raskin Ke Titik Distribusi
- 4) Waktu pendistribusian
- 5) Penyerahan beras ke RTS-PM Raskin

2. Menganalisa efektifitas pelaksanaan program raskin di Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok berdasarkan indikator keberhasilannya.

- 1) Tepat Sasaran
- 2) Tepat Jumlah
- 3) Tepat Harga
- 4) Tepat Waktu
- 5) Tepat Administrasi
- 6) Tepat Kualitas

3. 6. Analisa Data

Data dan informasi yang diperoleh di lapangan dianalisa secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Sudjarwo (2001) menyatakan, pada prinsipnya peneliti harus terjun langsung menjadi partisipan aktif bersama responden. Oleh karenanya

5) Tepat administrasi

Dapat diukur dengan menghitung berapa persen pemenuhan aplikasi dari 10 aspek administrasi yang digariskan sebagai berikut : juknis Raskin, SK penetapan RTS, SK pengangkatan petugas, daftar penerima raskin, kartu RTS, kupon beras, berita acara penerimaan beras, catatan penerima pembayaran, berita acara pendistribusian, bukti setor pembayaran.

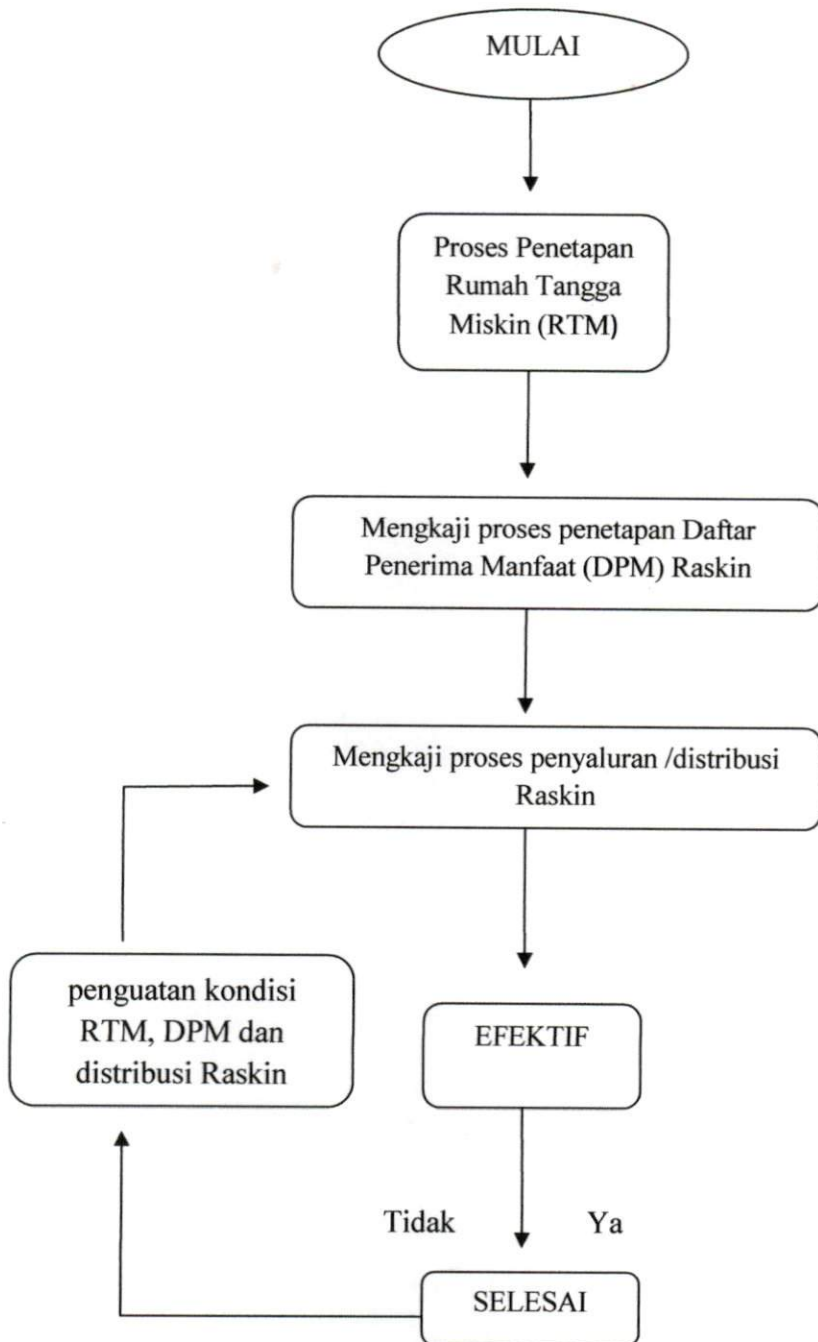
6) Tepat Kualitas

Tepat kualitas merupakan persentase ketepatan kualitas beras yang diterima oleh sampel dibandingkan kualitas standart Raskin.

(Sumber : Desilina, Evaluasi Program Raskin di Kota Solok, 2009)

3.7. Kerangka analisis Penelitian

Penelitian ini dimulai dengan mengetahui data tentang Proses Penetapan Rumah Tangga Miskin (RTM) di kelurahan VI Suku. Pihak-pihak yang terlibat di dalam penepatan RTM ini adalah Pemerintah Kota Solok, BPS, pihak dari Kelurahan VI Suku, pihak Kecamatan Lubuk Sikarah dan ketua RT. Selanjutnya dilakukan pengkajian proses Penetapan Daftar Penerima Manfaat (DPM) dari raskin dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah Ketua RT. Kemudian setelah itu dilakukan pengkajian proses penyaluran Raskin. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Perum Bulog, Satuan Kerja Raskin (SATKER), Pelaksana Distribusi dan RTM penerima Manfaat Raskin. Agar manfaat dari pada program Raskin ini dapat dirasakan langsung oleh DPM Raskin, diharapkan Pelaksanaan Raskin ini berjalan dengan baik dan lancar. Jika didalam pelaksanaannya, Program Raskin ini tidak berjalan dengan efektif, diperlukan suatu penguatan kondisi RTM, DPM dan distribusi Raskin tersebut agar untuk selanjutnya pelaksanaan Program Raskin ini dapat berjalan dengan efektif. Kerangka analisis penelitian ini dapat di lihat pada Gambar 1.



Gambar 1 : Kerangka Analisis Penelitian

3.8. Defenisi Operasional

1. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin adalah hasil pendapatan PPLS 08 BPS di desa/Kelurahan yang berhak menerima Raskin dan/atau hasil musyawarah deasa/Kelurahan yang dimasukkan dalam Daftar Penerima Manfaat-1 (Model DPM-1) yang ditetapkan oleh kepala desa/lurah dan disahkan oleh camat.
2. Musyawarah Desa/Kelurahan merupakan forum musyawarah di tingkat desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, dikelompok masyarakat desa/kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan setempat (SLS) setingkat dusun/RW untuk menetapkan daftar nama RTS-PM.
3. Titik Distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh pemerintah kabupaten/kota dengan Divre/Subdivre/Kansilog Perum Bulog.
4. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja (Pokja) di TD atau Warung Desa (Wardes) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah yang diberi tugas menerimaberass dari Satker Raskin dan menjual/menyerahkan kepada RTS-PM Raskin di TD serta menyetorkan uang HPB kepada Satker Raskin atau menyetor ke Rekening HPB BULOG yang di tetapkan.
5. Kelompok Keraja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat desa/kelurahan yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh kepala desa/lurah sebagai pelaksana distribusi Raskin.
6. Warung Desa (Wardes) adalah lembaga ekonomi di tingkat desa/kelurahan, baik milik masyarakat , koperasi maupun pemerintah desa/kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin kepada pengelola Wardes

dan sekaligus tempat penjualan beras pengelola wardes kepada RTS-PM Raskin.

7. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh kepala desa/lurah sebagai pelaksana distribusi Raskin.
8. Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk oleh Divisi Regional (Divre)/Sub Divisi Regional (Subdivre)/Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Perum Bulog terdiri dari ketua dan anggota yang diangkat dengan Surat Perintah (SP) Kadivre/Kasub Divre/KaKansilog.
9. Beras raskin adalah beras untuk keluarga miskin yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran RTM melalui pemberian bantuan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar pangan dalam bentuk beras.
10. Pagu Alokasi Raskin adalah jumlah beras Raskin yang disalurkan kepada RTS-PM.
11. HPB adalah harga penjualan beras secara tunai sebesar Rp. 1.600,- / kg netto di TD.
12. Profil kemiskinan adalah gambaran kemiskinan di daerah penelitian yang bertujuan melihat karakteristik kemiskinan yang dapat ditemukan di daerah tersebut, meliputi gambaran geografis daerah, gambaran kelembagaan yang terdapat di daerah tersebut dan keadaan RTM itu sendiri.
13. RTM (Rumah Tangga Miskin) adalah keluarga miskin yang dapat dilihat dari identifikasi sebagai buruh (tanpa modal), petani / nelayan atau pengrajin skala kecil.
14. Keberhasilan program adalah sejauh mana keberhasilan program raskin diukur dengan indikator yang dikeluarkan oleh oleh bulog dalam pedoman umum raskin, yakni:
 - 1) Tepat Sasaran
Raskin hanya diberikan kepada Rumah Tangga miskin, Penerima Manfaat Raskin merupakan hasil musyawarah Desa yang terdaftar dalam

Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) dan diberi identitas (kartu raskin atau tanda lain)

2) Tepat Jumlah

Jumlah beras Raskin yang merupakan hak Penerima Manfaat adalah sebanyak 156 kg/RTS/tahun.

3) Tepat Harga

Harga beras Raskin adalah sebesar Rp. 1.600,-kg/RTS/tahun di titik distribusi.

4) Tepat Waktu

Waktu pelaksanaan distribusi beras Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin sesuai dengan rencana distribusi.

5) Tepat Administrasi

Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.

6) Tepat Kualitas

Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan standar kualitas beras Bulog.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4. 1. Gambaran daerah penelitian

4. 1. 1. Kondisi Geografis

Kota Solok terletak pada posisi geografis yang sangat strategis dengan luas wilayah 57,64 Km² (0,14% dari luas Propinsi Sumatera Barat). Kota Solok dikelilingi oleh beberapa nagari pada Kabupaten Solok, dimana Kota Solok memiliki peran sentral di dalam menunjang perekonomian masyarakat Kota Solok dan Kabupaten Solok Pada umumnya (Profil Kelurahan VI Suku, 2010).

Secara Astronomis Geografis posisi Kota Solok berada pada 0⁰32 LS sampai dengan 1⁰45 LS dan 100⁰32 BT sampai dengan 101⁰41 BT. Topografi Kota Solok bervariasi antara dataran dan berbukit dengan ketinggian 390 m di atas permukaan laut. Terdapat tiga anak sungai yang melintasi Kota Solok, yaitu sungai Batang Lembang, Batang Gawan dan Batang Air Binguang. Suhu udara di Kota Solok sendiri berkisar antara 28,9⁰C dan minimal 26,1⁰C (Profil Kelurahan VI Suku, 2010).

Kota Solok terdiri dari dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kecamatan Tanjung Harapan. Kelurahan VI Suku merupakan salah satu dari 7 kelurahan yang ada di Kecamatan Lubuk Sikarah, Kelurahan yang lain adalah Kelurahan Tanah Garam, Kelurahan Sinapa Piliang, Kelurahan IX Korong, Kelurahan KTK, Kelurahan Aro IX Korong dan Kelurahan Simpang Rumbio. Kelurahan VI Suku berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tanah Garam
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sinapa Piliang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tanah Garam
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kampung Jawa dan Nan Balimo.

Secara adat, Kelurahan VI berarti wilayah yang didiami oleh 6 suku, yaitu Suku Caniago, Suku Bali Mansiang, Suku Singkuang, Suku Kutanyia, Suku Sinapa dan Suku Koto. Kelurahan VI Suku mempunyai luas wilayah lebih kurang 360 Ha

dan dari luas wilayah tersebut sebagian besar dipergunakan untuk persawahan seluas 88 Ha, perkebunan seluas 110 Ha dan pekarangan seluas 143 Ha.

4. 1. 2. Kondisi Demografi

Penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan karena merupakan subjek pembangunan yang ditentukan oleh sumber daya manusianya. Jumlah penduduk Kelurahan VI Suku berdasarkan hasil Proyeksi BPS pada tahun 2009 tercatat sebanyak 5.977 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.660. Penduduk yang bertempat tinggal di Kelurahan VI Suku terdiri dari penduduk asli dan pendatang. Suku aslinya adalah Minangkabau dan suku pendatang terdiri dari Jawa, Batak, Sunda, dan sebagainya. Mayoritas penduduk Kelurahan VI Suku bekerja disektor perdagangan (Profil Kelurahan VI Suku, 2010).

Permasalahan kemiskinan di Kelurahan VI Suku pada umumnya ditemukan pada beberapa kelompok masyarakat daerah pinggiran serta di pusat-pusat kegiatan ekonomi. Mayoritas penduduk miskin yang ada di Kelurahan VI Suku mempunyai mata pencarian sebagai swasta, petani dan buruh. Dengan tingkat pendidikan rata-rata tidak tamat SD. Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kelurahan VI Suku ini tercatat berjumlah 168 KK (BPS, 2009).

4. 2. Identitas Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)

Dari hasil penelitian di lapangan diperoleh identitas umum Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin. Rincian dari umur, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin di Kelurahan VI Suku dapat melihat Tabel 2 dan Lampiran 3.

Tabel 2. Jumlah RTS-PM berdasarkan umur, jenis kelamin dan tingkat pendidikan penerima manfaat Raskin tahun 2010.

No.	Uraian	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Umur		
	35 – 39	6	14
	40 – 44	13	31
	45 – 49	9	21
	50 – 54	8	19
	55 - 59	5	12
	60 – 64	1	2
2	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	36	86
	perempuan	6	14
3	Tingkat Pendidikan		
	Tamat SD	10	24
	Tamat SMP	15	36
	Tamat SMA	17	40

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa kisaran terbesar umur kepala keluarga miskin antara 40 – 44 tahun (31%), terdapat kepala keluarga perempuan sejumlah 14% oleh pihak perempuan. Dalam kategori tingkat pendidikan, responden banyak yang berpendidikan tinggi yakni Tamat SMA sebanyak 40% dibandingkan dengan yang tamat SMP sebanyak 36% dan tamat SD sebanyak 24%. Hal ini berbeda dengan kriteria menurut BPS yang menyatakan bahwa pendidikan tertinggi kepala keluarga miskin adalah tidak tamat sekolah/tidak tamat SD/hanya SD.

Gambaran RTS-PM yang di Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok secara lebih rinci adalah:

1. Pekerjaan RTS-PM

Pekerjaan bisa berpengaruh pada tingkat kesejahteraan keluarga. Salah satu yang dapat menimbulkan kemiskinan disebabkan jenis pekerjaan kepala keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian, jenis pekerjaan RTS-PM secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Pekerjaan Kepala Keluarga RTS-PM

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah responden	Persentase (%)
1	Petani	9	21
2	Buruh	13	31
3	Wiraswasta	20	48
Jumlah		42	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jenis pekerjaan responden paling banyak adalah wiraswasta yakni sebanyak 20 orang atau 48%. Pekerjaan wiraswasta disini maksudnya adalah berjualan di warung atau dagang asongan dan bengkel sepeda motor.

2. Jumlah Tanggungan Keluarga RTS-PM

Jumlah tanggungan keluarga merupakan total dari jumlah anggota keluarga yang terdiri dari suami/istri, anak-anak, sanak saudara, serta orangtuanya yang tidak mampu lagi untuk bekerja yang hidup menetap bersama keluarga tersebut.

Tabel 4. Jumlah Tanggungan Keluarga Responden

No.	Jumlah Tanggungan Keluarga/KK	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	1 – 3	20	48
2	4 – 6	20	48
3	7 – 9	2	4
Jumlah		42	100

Dari hasil penelitian dalam Tabel 4, mayoritas responden memiliki tanggungan 1 – 6 orang tiap KK nya. Hanya 2 orang atau 4% yang memiliki tanggungan antara 7 – 9 orang. Jumlah tanggungan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan di tingkat keluarga. Jika tanggungan sebuah keluarga

banyak dan dihubungkan dengan tingkat pendapatan yang rendah, maka besar kemungkinan keluarga tersebut tergolong pada kategori keluarga miskin.

3. Jumlah Penghasilan

Pendapatan merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh seseorang dalam suatu periode tertentu. Pendapatan yang rendah menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan dalam sebuah keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kisaran penghasilan terbesar berada pada rentang Rp. 500.000,- s/d Rp. 1.000.000,- yakni sebanyak 16 RTS-PM atau 38% dan sebanyak 12 RTS-PM atau 29% penghasilannya berada pada rentang 0 – Rp. 500.000,-. Untuk lebih jelasnya dapat melihat Tabel 5.

Tabel 5. Jumlah Penghasilan Responden

Jumlah Penghasilan	Jumlah responden	Persentase (%)
0 – Rp. 500.000,-	2	29
Rp. 500.000,- - Rp. 1 juta	16	38
>1 juta	14	33
Jumlah	42	100

Dari 42 responden ada sekitar 14 orang yang pendapatannya di atas Rp. 1.000.000,-. Ini tidak sesuai dengan kriteria dari BPS yang menyatakan bahwa jumlah penghasilan KK miskin dibawah Rp. 600.000,-. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi ketidaksesuaian antara kriteria kemiskinan yang digunakan BPS dengan kondisi responden dilapangan. Hal ini disebabkan karena lemahnya proses seleksi yang dilakukan oleh aparat terkait, sehingga ditemukan keluarga yang tidak sepatasnya mendapatkan Raskin.

4. Kondisi Rumah dan Sarana Fasilitas

Menurut BPS, keluarga miskin dicirikan dengan kondisi rumah yang tidak memadai, yakni berlantaikan tanah/papan/semen berkualitas rendah, dindingnya terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester. Hasil

penelitian dilapangan mengenai kondisi rumah tangga sasaran Raskin dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Kondisi Rumah

Uraian		Jumlah RTS-PM	Persentase (%)
Luas Rumah	0 – 8 M ²	34	81
	>8 M ²	8	19
Jumlah		42	100
Lantai	Tanah	0	0
	Papan	13	31
	Semen	29	69
Jumlah		42	100
Dinding	Papan	18	43
	Semi tembok	9	21
	Tembok	15	36
Jumlah		42	100

Tabel ini menunjukkan bahwa pada umumnya responden memiliki luas rumah 0 – 8 M² sebanyak 34 orang atau 81%. Untuk jenis lantai sebanyak 69% telah memiliki lantai yang terbuat dari semen dan 0% yang lantainya dari tanah. Sedangkan untuk dinding rumah pada umumnya terbuat dari papan yakni sebanyak 43% atau 18 orang.

Kemudian untuk sarana fasilitas rumah responden berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebanyak 81% responden telah memiliki jamban sendiri, untuk sumber air bersih ada sekitar 7% responden yang belum memiliki sumber air bersih sendiri dan untuk penerangan, sebanyak 98% responden telah memiliki penerangan di rumah mereka. Untuk lebih jelasnya dapat melihat Tabel 7.

Tabel 7. Sarana Fasilitas Rumah

Uraian	Ada	Tidak	Persentase (%)
Jamban	34	8	81
Sumber air bersih	39	3	93
Penerangan listrik	41	1	98

5. Frekuensi makan Responden

BPS juga menyatakan bahwa frekuensi makan keluarga miskin adalah 1 – 2 X dalam sehari. Untuk mengetahui frekuensi makan responden, dapat melihat Tabel 8.

Tabel 8. Frekuensi makan responden

Frekuensi makan	Jumlah RTS-PM	Persentase (%)
1 – 2 X	4	10
>2X	38	90
Jumlah	42	100

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa 90% responden atau sebanyak 38 orang yang frekuensi makanya lebih dari 2X sehari. Hal ini menunjukkan bahwa frekuensi makan RTS-PM lebih banyak tidak sesuai dengan frekuensi makan KK miskin menurut BPS.

4. 3. Proses pelaksanaan Program Raskin di Kelurahan VI Suku

a. Pemilihan RTS-PM

Pelaksanaan Program Raskin di Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok diatur dalam petunjuk teknis program Raskin Kota Solok yang ditetapkan melalui keputusan Walikota Solok No. 7 Tahun 2004. Untuk tahun 2010 ini, pelaksanaan program Raskin di Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok masih mengacu kepada petunjuk teknis yang ditetapkan pada tahun 2004 tersebut.

Pemilihan Rumah Tangga Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Raskin mengacu pada Jumlah Rumah Tangga Miskin dari data BPS. Daftar Penerima Manfaat (DPM) Raskin adalah daftar Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa/Kelurahan hasil seleksi melalui proses musyawarah Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan kemudian disahkan oleh Camat (Bulog, 2010).

Didalam pelaksanaannya, Daftar Penerima Manfaat (DPM) Raskin di Kelurahan VI Suku memakai data jumlah penduduk miskin dari Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) tahun 2010 yang diajukan oleh Walikota Solok, kemudian data tersebut disesuaikan dengan jumlah keluarga miskin menurut data BPS kota Solok. Data jumlah penduduk miskin tersebut kemudian di olah dan ditinjau langsung oleh pihak Kelurahan VI Suku dengan menggunakan 14 kriteria kemiskinan yang ditetapkan oleh pihak BPS. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir ketidaktepatan sasaran penerima manfaat dari Program Raskin. Jumlah DPM berdasarkan data dari BPS adalah sebanyak 168 KK dan setelah dilakukan peninjauan ulang oleh pihak Kelurahan jumlah tersebut tidak mengalami peningkatan maupun penurunan. Selanjutnya data yang telah diolah tersebut ditetapkan oleh Lurah dan disahkan oleh camat sebagai atasannya.

b. Penetapan RTS-PM

Setelah data mengenai pemilihan RTS-PM Raskin selesai diolah oleh pihak Kelurahan, maka data tersebut disahkan oleh Lurah dan Camat dan ditetapkan sebagai Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin. Selanjutnya Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) diberi Kartu Raskin yang berguna untuk pengambilan beras di Kantor Lurah sendiri. Kartu tersebut harus dibawa setiap kali pengambilan beras. Kartu Raskin ini berasal dari Kantor Kelurahan VI Suku yang berfungsi sebagai identitas penerima manfaat Raskin guna menebus beras Raskin di Titik Distribusi.

RTS-PM yang telah ditetapkan sebagai Daftar Penerima Manfaat (DPM) Raskin tahun 2010 yang telah mendapatkan identitas penerima Raskin berupa Kartu Raskin dari ketua RT pada saat pendistribusian akan memberikan kartu Raskin tersebut dan uang sejumlah Rp. 24.000,- kepada Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi (kantor Lurah VI Suku) untuk menebus beras Raskin sebanyak 15 kg. Hal ini dilakukan agar tiap-tiap RTS-PM mendapatkan beras sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Kemudian nama RTM tersebut dicatat oleh Pelaksana Distribusi dalam

Model DPM-2 dan ditandatangani oleh Lurah atau Sekretaris Lurah Kelurahan VI Suku.

Meski telah melakukan peninjauan ulang, tetapi masih didapati KK yang tidak pantas untuk menerima Program Raskin atau dengan kata lain masih ditemui KK yang tergolong mampu. Dari 42 sampel yang ada didapati hanya 24 KK yang tergolong miskin dan sebanyak 18 KK tergolong mampu dengan kondisi rumah yang luasnya lebih dari 8 M², jumlah penghasilan KK nya lebih dari Rp. 1.000.000,- per bulan, frekuensi makan 3X sehari, dan memiliki aset/barang berharga senilai minimal Rp. 500.000,- (Lampiran 7). Hal ini menunjukkan bahwa perlu untuk melakukan verifikasi data mengenai jumlah Rumah Tangga Miskin dan perlu keseriusan untuk melakukan peninjauan ulang di lapangan agar program Raskin dapat diraskan oleh keluarga yang benar-benar membutuhkan.

c. Pendistribusian Raskin ke Titik Distribusi

Pendistribusian Beras Raskin di Kota Solok dilaksanakan di Kantor Lurah setempat sebagai Titik Distribusi. Menurut Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Solok, pendistribusian ini sebelumnya dilakukan di Kantor Camat setempat, barulah pada tahun 2008 dilaksanakan di masing-masing kantor lurah. Titik Distribusi yang digunakan untuk pelaksanaan pendistribusian beras Raskin di Kelurahan VI Suku adalah Kantor Lurah VI Suku itu sendiri. Bulog (2010) menyatakan bahwa mekanisme distribusi beras Raskin adalah berdasarkan Pagu Alokasi Raskin, Satuan Kerja (Satker) Raskin mengangkut beras Raskin dari Gudang Perum Bulog dan menyerahkan kepada Pelaksanan Distribusi di Titik Distribusi. Penyerahan beras Raskin di Titik Distribusi dituangkan dalam dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Satker Raskin dan Pelaksana Distribusi yang menerima beras Raskin serta diketahui oleh Kepala/Desa/Lurah/Camat atau pejabat yang mewakili atau ditunjuk.

Sedangkan menurut keterangan Kepala Bagian Perekonomian Kota Solok, mekanisme pendistribusian beras Raskin ini pertama sekali adalah dengan mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Raskin ke Kasubdivre Bulog wilayah

Solok yang diajukan oleh Walikota Solok. Berdasarkan SPA Raskin tersebut, Kasubdivre Bulog wilayah Solok menerbitkan *Delivery Order* (DO) beras kepada kepada Satgas Raskin sesuai jumlah dan jadwal alokasi yang diajukan oleh Walikota. Oleh Satgas Raskin DO tersebut ditujukan kepada Kepala Gudang agar dapat mengambil beras Raskin sesuai permintaan Walikota yang tertulis dalam SPA. Satgas Raskin bertugas mengangkut beras dari Gudang agar dapat mengambil beras Raskin dari gudang Bulog ke kantor-kantor Lurah sebagai Titik Distribusi, yang diterima oleh Lurah. Penyerahan ini dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak disertai cap/stempel dan nama lengkap dan identitasnya serta diketahui saksi.

d. Waktu Pendistribusian

Jadwal pendistribusian sesuai dengan hasil musyawarah pemerintah Kota Solok dengan Sub Divisi Regional Wilayah Solok yakni setiap dua bulan sekali yang didistribusikan setiap awal bulan sampai dengan tanggal 15 tiap bulannya. Waktu yang lebih kurang selama 2 minggu tersebut, digunakan oleh pelaksana distribusi, aparat pemerintahan Kelurahan untuk menimbang beras, memasukkan dalam karung dan membagikannya kepada masyarakat.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa seluruh RTS-PM (100%) menilai jadwal pendistribusian tidak sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Pendistribusian selalu dilakukan diatas tanggal 15. Menurut Pihak bulog keterlambatan distribusi beras ke Titik Distribusi ini disebabkan oleh keterlambatan penyetoran uang penjualan Raskin oleh Pihak Kelurahan. Sedangkan menurut Kasi Kesra kelurahan VI Suku, keterlambatan penyetoran uang penjualan lebih disebabkan karena tidak semua RTS-PM memiliki uang pada saat pengambilan beras. Oleh sebab itu pihak kelurahan memberi tenggang waktu dalam pelunasan pembayaran. Pihak kelurahan VI Suku menambahkan bahwa keterlambatan distribusi ke RTS-PM disebabkan karena dalam mempersiapkan dan mempacking beras dibutuhkan waktu yang cukup lama sementara tenaga petugas yang masih kurang.

e. Penyerahan Beras ke RTS-PM

Setelah beras sampai dikantor Lurah, petugas kelurahan selanjutnya menimbang dan mempacking beras ke dalam masing-masing karung sesuai jumlah penerimanya. Selanjutnya Pihak Kelurahan memberikan informasi kepada RTS-PM melalui RT/RW setempat bahwa beras sudah dapat diambil. Dengan membawa tanda bukti berupa kartu raskin, Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dapat membeli beras dengan Harga Rp. 1.600,-/Kg dan masing-masing RTS-PM mendapat 15 kg beras tiap bulannya.

Menurut keterangan dari 42 sampel, mereka menyatakan bahwa harga beras yang telah ditetapkan sama dengan harga tebus yang mereka bayarkan. Sedangkan untuk jumlah beras, jumlah yang telah ditetapkan per bulannya sama dengan jumlah yang diterima hanya saja pendistribusian dilakukan tiap 2 bulan sekali sehingga setiap kali pendistribusian mereka mendapatkan 30 kg.

Setelah uang penjualan beras semuanya terkumpul, maka petugas Kelurahan menyetorkan uang tersebut kepada Bulog Wilayah Solok dan untuk pagu Raskin yang di tambahkan oleh Pemerintah daerah maka uang penjualan beras Raskin di setorkan kepada Kantor Walikota melalui Kepala Bagian perekonomian. Dalam pelaksanaannya di Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok sudah memenuhi prosedur mekanisme distribusi Raskin yang ditetapkan oleh Perum Bulog (2010).

4. 4. Efektifitas Pelaksanaan Raskin

Untuk melihat keberhasilan Program Raskin di Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, dapat melihat dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya dengan menggunakan 6 indikator keberhasilannya.

1. Tepat Sasaran

Menurut Bulog (2010), Raskin hanya diberikan kepada RTM Penerima Manfaat Raskin hasil musyawarah Desa yang telah terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) sesuai dengan data BPS dan yang diberi identitas. Penerima Raskin secara Nasional ditetapkan sesuai dengan pagu yang berdasarkan data dari BPS.

Adapun Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang dapat menerima Raskin tersebut adalah Rumah Tangga yang memenuhi kriteria BPS.

Untuk melihat tepat sasaran pelaksanaan program raskin di Kelurahan VI Suku, dapat diukur berdasarkan jumlah RTS-PM yang sesuai kriteria sebagai penerima Raskin dibagi jumlah RTS-PM secara keseluruhan lalu dikalikan dengan 100%. Dari hasil pengamatan dilapangan diketahui bahwa hanya 24 responden atau 57% yang sesuai dengan kriteria kemiskinan menurut BPS dan sisa nya sebanyak 18 responden atau 43% tidak sesuai dengan kriteria kemiskinan menurut BPS.

$$\begin{aligned}
 TS_{(\%)} &= \frac{\Sigma \text{ sampel sesuai kriteria}}{\Sigma \text{ sampel secara keseluruhan}} \times 100\% \\
 &= \frac{24}{42} \times 100\% \\
 &= 57\%
 \end{aligned}$$

Hasil pengamatan dilapangan menunjukkan bahwa kondisi RTS-PM yang tepat sasaran diantaranya adalah memiliki luas rumah kurang dari 8 m², jenis lantai terbuat dari tanah atau semen berkualitas rendah, jenis dinding terbuat dari papan atau tembok tanpa plester, tidak memiliki fasilitas jamban sendiri, sumber penerangan tidak menggunakan listrik, sumber air minum dari sumur tidak terlindung, bahan bakar yang digunakan untuk memasak adalah kayu/arang/minyak tanah, hanya mengkonsumsi daging/ayam/susu 1 kali seminggu, hanya membeli 1 stel pakaian dalam setahun, frekuensi makan 2X sehari, sumber penghasilan KK adalah bertani/buruh, pendidikan tertinggi KK adalah SD dan tidak memiliki tabungan atau aset berharga. Hal tersebut sesuai dengan indikator kemiskinan menurut BPS yang digunakan dalam penetapan RTS-PM Raskin Kelurahan VI Suku.

Dengan demikian pelaksanaan Raskin di Kelurahan VI Suku ini masih belum tepat sasaran, karena masih banyak Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh BPS kota Solok.

2. Tepat Jumlah

Menurut Bulog (2010) jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebanyak 15 kg/KK/bulan selama satu tahun. Di kelurahan VI Suku ini jumlah pagu yang disediakan oleh pemerintah pusat sebanyak 2.085 kg, jumlah ini hanya cukup untuk 139 KK. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah Kota Solok berinisiatif untuk menutupi kekurangan jumlah pagu tersebut dengan menggunakan dana APBD. Sehingga jumlah pagu sesuai dengan jumlah RTS-PM.

$$\begin{aligned}
 TJ_{(\%)} &= \frac{\Sigma \text{ beras yang diterima}}{\Sigma \text{ beras sesuai pagu}} \times 100\% \\
 &= \frac{630 \text{ kg}}{630 \text{ kg}} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama bahwa beras Raskin dibagikan setiap 2 bulan sekali dengan jumlah 30 kg per KK. Berdasarkan keterangan dari semua RTS-PM Raskin Kelurahan VI Suku (42 responden) jumlah beras yang mereka terima sama dengan jumlah beras yang telah ditentukan yakni 30 kg/2 bulan. Untuk indikator tepat jumlah sudah berjalan dengan baik yakni telah mencapai mencapai 100% .

3. Tepat Harga

Bulog (2010) menyatakan bahwa harga tebus Raskin adalah sebesar Rp.1.600,- /kg netto di Titik Distribusi (TD). Tepat harga merupakan tingkat kesesuaian harga tebus Raskin oleh RTS-PM berdasarkan standart. Dapat diukur dengan membagi harga standart tersebut dengan rata-rata harga tebus dilapangan dikali 100%. Dari hasil penelitian dilapangan harga tebus yang yang dibayarkan oleh RTS-PM sama dengan harga standart yang telah ditetapkan yakni sebesar Rp.1.600,- /kg nya.

$$\begin{aligned}
 TH (\%) &= \frac{\text{Harga Standart Raskin}}{\text{Harga dilapangan}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp.1.600,-}}{\text{Rp. 1.600,-}} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Semua RTS-PM Raskin (42 responden) menyatakan bahwa harga tebus yang mereka bayarkan sama dengan harga standart yang telah ditetapkan oleh pihak Bulog yakni Rp. 1.600,-/kg. Sesuai dengan kesepakatan bersama bahwa pendistribusian Raskin dilakukan setiap dua bulan sekali, maka harga yang dibayarkan oleh RTS-PM adalah sebanyak Rp. 24.000,- untuk 30 kg beras. Dengan demikian untuk indikator Tepat harga pelaksanaan Program Raskin di Kelurahan VI Suku sudah terlaksana dengan baik yakni sudah 100%.

4. Tepat Waktu

Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTS-PM Raskin sesuai dengan rencana distribusi. Jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Solok dan hasil musyawarah di kelurahan beserta Bulog wilayah Solok adalah satu kali dalam dua bulan yang didistribusikan setiap awal bulan sampai dengan tanggal 15. Namun berdasarkan hasil penelitian dilapangan, jadwal pendistribusian tidak sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Semua RTS-PM Raskin (42 responden) mengatakan bahwa pendistribusian dilakukan diatas tanggal 15 tiap bulannya. Untuk lebih jelasnya dapat melihat Tabel 9.

$$\begin{aligned}
 TW (\%) &= \frac{\text{Rata-rata skor}}{5} \times 100\% \\
 &= \frac{3,45}{5} \times 100\% \\
 &= 69\%
 \end{aligned}$$

Tabel 9. Ketepatan Waktu pendistribusian Raskin

No.	Rata-rata keterlambatan (hari)	Jumlah Responden	Persentase	Nilai skor	Jumlah rata-rata skor
1	1 – 2	19	45%	4	76
2	3 – 5	23	55%	3	69
Rata-rata skor					3,45

Maka untuk indikator tepat waktu, pelaksanaan program Raskin belum berjalan dengan baik hanya mencapai 69% artinya belum sepenuhnya berhasil. Menurut hasil wawancara dengan Kasi Kesra pada Kelurahan VI Suku, ketidaktepatan waktu ini lebih disebabkan karena persiapan pendistribusian seperti menimbang dan mempacking memakan waktu yang cukup lama. Selain itu keterlambatan ini juga diakibatkan karena adanya RTS-PM yang belum memiliki uang untuk menebus beras, sehingga mereka meminta untuk pengunduran distribusi. Biasanya pihak kelurahan memberi kelonggaran waktu kepada masyarakat selama satu minggu setelah jadwal yang ditentukan. Hal inilah yang menyebabkan keterlambatan pihak Kelurahan untuk menyetor dana Raskin ke Bulog, sehingga distribusi beras Raskin untuk bulan berikutnya mengalami keterlambatan.

5. Tepat Administrasi

Untuk melihat tepat administrasi dapat dilihat dari berapa persen komponen administrasi yang dipenuhi, dengan cara menghitung jumlah komponen yang dipenuhi dibagi dengan jumlah komponen secara keseluruhan dibagi 100%.

$$\begin{aligned}
 TA_{(\%)} &= \frac{\text{Komponen yang dipenuhi}}{10} \times 100\% \\
 &= \frac{8}{10} \times 100\% \\
 &= 80\%
 \end{aligned}$$

Dari hasil penelitian dilapangan diketahui bahwa komponen administrasi program Raskin yang dilengkapi oleh Kelurahan VI Suku sebanyak 8 komponen atau sebesar 80%. Adapun administrasi yang harus dilengkapi dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Komponen Administrasi Raskin

No.	Komponen	Kondisi dilapangan
1	Pedoman Umum Raskin	Ada
2	SK penetapan RTS-PM	Ada
3	SK pengangkatan Petugas	Ada
4	Daftar penerima Raskin	Ada
5	Kartu RTS	Ada
6	Kupon Beras	Tidak Ada
7	Berita Acara penerimaan beras	Ada
8	Catatan penerimaan pembayaran	Ada
9	Berita acara pendistribusian	Tidak Ada
10	Bukti setor pembayaran	Ada

Sumber : Diolah dari Data Kelurahan VI Suku

Menurut kepala bagian perekonomian Kota Solok, untuk Kupon Raskin memang ditiadakan karena RTS-PM sudah memiliki kartu Raskin yang digunakan untuk mengambil Raskin pada saat pendistribusian. Maka kartu tersebut juga berguna sebagai kupon. Sedangkan untuk berita Acara pendistribusian, menurut Kasi Kesra Kelurahan VI Suku pendistribusian memang tidak ada dan diganti dengan surat pemberitahuan pendistribusian dari Lurah kepada ketua RT/RW setempat.

6. Tepat Kualitas

Bulog (2010) menyatakan bahwa tepat kualitas adalah terpenuhinya persyaratan kualitas medium kondisi baik dan tidak berhama. Adapun ketentuan beras berstandart medium tersebut adalah: a) kadar air 14%, b) patah 20%, c) sosoh 90%, d) berwarna cerah dan e) sedikit berbau tetapi tidak apeg. Hasil yang diperoleh dilapangan menyatakan bahwa sebanyak 14 responden atau 33% mengatakan kualitas beras yang diterima cukup baik dengan kondisi beras berwarna cerah dan tidak berbau apeg. Sementara itu sebanyak 28 responden atau 67% mengatakan bahwa kualitas beras yang diterima kurang baik dengan kondisi berwarna agak merah atau kekuningan dan berbau apeg. Untuk lebih jelasnya dapat melihat Tabel 11.

Tabel 11. Kondisi Beras

Kategori	Kondisi Beras	Jumlah RTS-PM	Persentase
Baik	- Berwarna cerah - Tidak berbau apege	14	33%
Kurang baik	- Berwarna agak merah atau kekuningan - Berbau apege	28	67%

Dari hasil wawancara dilapangan dengan kepala Bulog Sub Divisi wilayah Solok, kondisi beras Raskin sebenarnya sudah sesuai dengan kualita medium. Hanya saja karena beras terlalu lama disimpan di gudang penyimpanan menyebabkan beras Raskin tersebut berbau apege. Selain itu beras Raskin tersebut juga disimpan oleh pihak Kelurahan sehingga tidak menjamin kondisi beras tersebut dalam keadaan baik.

Dari hasil perhitungan masing-masing indikator keberhasilan, dapat diakumulasikan tingkat efektifitas Pelaksanaan Program Raskin di Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok tahun 2010 berdasarkan Pedoman Umum Raskin Awards. Untuk lebih rinci dapat melihat Tabel 12.

Tabel 12. Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Raskin

No.	Indikator	Hasil Penilaian (%)
1	Tepat Sasaran	57
2	Tepat Jumlah	100
3	Tepat Harga	100
4	Tepat Waktu	69
5	Tepat Administrasi	80
6	Tepat Kualitas	33
Rata-rata		73,1

Untuk melihat keberhasilan keseluruhan nilai skor total yakni 439 dibagi dengan jumlah indikator yakni 6 dan dikali 100%. Maka didapatkan tingkat keberhasilan program Raskin di Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok sebesar 73,1%. Berdasarkan ketentuan dari pedoman umum raskin awards

dalam Desilina (2009) maka nilai tersebut berada pada interval 70 - 80% dengan kategori baik.

Hasil penelitian di lapangan menyatakan pada umumnya Responden berpendapat bahwa Program Raskin ini bermanfaat dalam membantu memenuhi kebutuhan beras dan meningkatkan kuantitas konsumsi mereka. Jika rumah tangga miskin memperoleh secara penuh 15 kg per bulan, tujuan pengurangan beban mencapai sekitar 37,5% dari kebutuhan beras karena rata-rata rumah tangga mengkonsumsi beras sekitar 40 kg per bulan (SMERU, 2008). Dan seluruh RTS-PM sepakat agar Program Raskin di Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok tetap dilanjutkan. Untuk itu, agar pelaksanaan program Raskin lebih optimal dan beberapa kelemahannya dilapangan dapat dikurangi, maka program ini perlu untuk disempurnakan agar dapat lebih bermanfaat dan indikator keberhasilannya dapat tercapai dengan baik. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kelurahan VI Suku dan dengan masalah-masalah yang ada, maka diperlukan beberapa upaya seperti penguatan RTM, DPM dan distribusi Raskin agar keberhasilan program ini dapat tercapai dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin di Kelurahan VI Suku tidak tepat sasaran. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Daerah menggunakan data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPN) pada saat mengajukan Surat Pengajuan Alokasi (SPA) ke Bulog. Data dari BKBPM ini memiliki kelemahan karena pada saat pengelolaannya menggunakan pendataan dari tingkat RT/RW, yang mungkin mengedepankan unsur kekeluargaan, sehingga kerabat atau keluarga yang seharusnya tidak termasuk keluarga kurang mampu mendapatkan Raskin. Untuk itu Pemerintah Pusat harus tegas dalam menentukan data jumlah RTS-PM Raskin. Pemerintah Pusat seharusnya memakai data yang dikeluarkan oleh BPS. Selain itu perlu diadakan musyawarah Desa/Kelurahan dalam menentukan RTS-PM, sehingga manfaat Program Raskin benar-benar dirasa oleh Rumah Tangga Miskin.

Selain itu, dalam pendistribusian Raskin di Kelurahan VI Suku juga belum tepat sasaran, karena masih ditemui masalah seperti keterlambatan beras yang datang

dari Bulog ke Titik Distribusi (TD), hal ini disebabkan karena adanya penunggakan pembayaran ke Bulog yang disebabkan karena adanya RTS-PM yang belum memiliki uang untuk menebus beras. Selain itu kurangnya tenaga petugas dalam proses pendistribusian. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan menyiapkan dana talangan dari APBD untuk menanggulangi kekurangan harga beras bagi keluarga miskin, sehingga pembayaran di Titik Distribusi (TD) tidak mengalami keterlambatan. Dan juga pemerintah perlu menambah petugas untuk pelaksanaan persiapan beras di TD, petugas tersebut bisa diminta dari RT/RW atau berasal dari masyarakat setempat dan diberi biaya operasionalnya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

1. Pelaksanaan program raskin di Kelurahan VI Suku sudah sesuai dengan Pedoman Umum (PEDUM) Raskin tahun 2010, dimulai dari mengajukan Surat Pengajuan Alokasi (SPA) oleh Walikota kepada Kasubdivre Bulog Wilayah Solok, kemudian Bulog menerbitkan *Delivery Order* kepada Satgas untuk mengambil beras di Gudang penyimpanan sesuai jumlah yang ditentukan. Setelah itu Satgas Raskin menyerahkan beras ke Titik Distribusi, dari Titik Distribusi beras di distribusikan ke tiap-tiap RTS-PM.
2. Pelaksanaan program raskin tersebut sudah berjalan efektif, dengan tingkat keberhasilan rata-rata 73,1%. Tingkat efektifitas masing-masing indikator keberhasilan adalah sebagai berikut :
 - a. Tepat sasaran belum berjalan dengan baik hanya 57%.
 - b. Tepat harga 100%
 - c. Tepat jumlah 100%
 - d. Tepat waktu 69%
 - e. Tepat administrasi 80%
 - f. Tepat kualitas 33%

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan program Raskin di Kelurahan VI Suku hendaknya dilakukan upaya-upaya seperti, memverifikasi data mengenai jumlah RTS-PM raskin, menambah jumlah pagu Raskin dengan menyediakan dana Raskin daerah, menyediakan dana talangan dan meningkatkan kualitas layanan.
2. Perlunya dilakukan kerjasama antara pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat dalam mengevaluasi keefektifan program Raskin agar dapat menghindari penyimpangan dilapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Alatas, Vivi. 2008. Kompas.com. edisi Juli 2008.

Anonym. *Pemetaan kemiskinan dan Strategi Pengentasannya Berbasis Institusi Lokal dan Berkelanjutan di Era Otonomi Daerah di provinsi Sumatera Barat.*

Anak Bangsa Peduli (2006) *Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Raskin Kota Cimahi dan Kabupaten Garut Tahun 2005.* Bandung: LSM ABP

Arifin, Bustanul. 2006. *Ketahanan Pangan Indonesia Mencemaskan.* Sinar Harapan 22 November 2006. www.sinarharapan.co.id.

Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Rineka Cipta : Jakarta.

Baliawati, dkk. 2004. *Pengantar Pangan dan Gizi.* Penebar Swadaya : Jakarta.

Bulog. 2010. *Pedoman Umum Raskin (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin).* Jakarta

BPPN. 2007. *Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2006 – 2010.*

[BPS] Badan Pusat Statistik. 1984. *Ciri-Ciri Kemiskinan dan Indikator Kemiskinan.* Jakarta. Indonesia.

[BPS] Badan Pusat Statistik. 1993. *Hasil survey Sosial Ekonomi Nasional 1992.* Jakarta

Desilina, E. *Evaluasi Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) di Kota Solok.*[Tesis]. 2009. Padang. Program Pasca Sarjana. UNAND.

Djoyohadikusumo. 1995. *Program IDT dan Pemberdayaan Masyarakat.* Aditya Media : Jakarta.

Esmara. 1986. *Politik Perencanaan Pembangunan, Teori Kebijakan dan Prospek.* Gramedia : Jakarta

Handewi. 2008. *Manajemen Ketahan Pangan Era Otonomi Daerah dan PerumBulog.* Bogor.

- Hendra. 2008. *Ketahanan Pangan*. Jakarta.
- Irawati, Prihatin, dkk. 2005. *Proses Pemberdayaan Petani dalam Konteks Proyek Peningkatan Pendapatan Petani Miskin melalui Inovasi (P4MI) : studi kasus Desa Sembalun Lawang Kec. Sembalun Kab. Lombok Timur*.
- Khairul.2006. *Efektifitas Program Pemberdayaan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kab. Padang Pariaman*. [Tesis]. Program Pasca Sarjana Universitas Andalas. Padang.
- LP3ES (2000) *Studi Evaluasi JPS-OPK Beras di Daerah Pedesaan Tahun Anggaran 1999/2000*. Jakarta: LP3ES
- Muliati, Yentis. 2008. *Mekanisme Pelaksanaan Program Raskin (beras untuk keluarga miskin) di Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang [Skripsi]*. Padang.
- Nazir. 1999. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Pakpahan. A. 1993. *Kelembagaan Inovatif dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Makalah PERHEPI : Jakarta.
- Panjaitan, Friando. 2005. *Efektifitas Penggunaan Modal Program Kredit Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) PTPN V dalam Meningkatkan Kinerja Usaha Kecil di Kota Pekanbaru*. [Tesis]. Program Pasca Sarjana Universitas Andalas. Padang.
- Pasaribu. 2006. *Poverty profile and the Alleviation Programme in Indonesia*. Paper Presented on "Asian regional seminar on povety Alleviation" Held by AFPPD and IFAD, 5-6 april 2006, Hanoi, Vietnam.
- Reflis. 1998. *Sikap dan Partisipasi petani terhadap Intensifikasi tanaman Pangan Melalui Supra Insus (studi kasus di Kecamatan Kepaliang, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu)*. [Tesis]. Pasca Sarjana UNAND. 168 hal.
- Rozany. A. Nurmanaf. 2003. *Partisipasi Masyarakat Petani Terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan*. Analisis Kebijakan Pertanian. Volume I. Jakarta. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Departemen Pertanian. Hal 110-122.

- Sajogyo. 1978. *Lapisan Masyarakat yang Paling Lemah di Pedesaan Jawa*. Prisma Nomor 3.
- Syahrial. 2008. *Efektifitas Modal Dana Bergulir Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), studi kasus program penanggulangan kemiskinan di kota padang pada kelurahan pampangan xx kecamatan lubuk begalung dan kelurahan alang laweh kecamatan padang selatan*. [Tesis]. Program Pasca Sarjana Universitas Andalas. Padang.
- SMERU. 2008. *Efektifitas Pelaksanaan Raskin*. SMERU Research Institute : Jakarta.
- Siregar, Hermanto dan Dwi Wahyuniarti. *Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap penurunan Jumlah Penduduk Miskin*.
- Sudaryanto dan Rusastra. 2006. *Kebijakan Strategis usaha Pertanian dalam rangka Peningkatan Produksi dan Pengentasan Kemiskinan*. Seminar Internasional Multifungsi Pertanian. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian, 27-28 juni 2006. Lido Lake Resort dan conference, Bogor.
- Sudjarwo. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandar Lampung. Cv. Mandar Maju. 106 hal.
- Tabor, Steven R. dan M. Husein Sawit (2006) . *Program Bantuan Natura Raskin dan OPK: Penilaian Makro*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perum Bulog
- Yakub, Yurizman. 2003. *Karakteristik RTM (Rumah Tangga Miskin) di Kota Padang Sebelum dan Sesudah Krisis Ekonomi Tahun 1998*. [Tesis]. Padang. Program Pasca sarjana. UNAND.
- Yusmar. 2001. *Evaluasi Kriteria Kemiskinan Menurut Program Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Masyarakat (Kasus di Desa Teratak Buluh dan Desa Muara Tskus Kabupaten Kampar)*. [Tesis]. Padang. Program Pasca sarjana UNAND.

No.	Tujuan	Topik Data	Indikator	Data	Sumber	Teknik Pengambilan	Analisis Data
1	Mendeskripsikan proses pelaksanaan Program Raskin di Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM). 2. Penyaluran Raskin 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilihan RTS-PM 2. Penyeleksian 3. Penetapan RTS-PM 1. Pendataan RTS-PM 2. Pemilihan RTS-PM 3. Penetapan RTS-PM 4. Pendistribusian Raskin ke TD 5. Waktu Pendistribusian 6. Penyerahan beras ke RTS-PM Raskin 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Primer: <ol style="list-style-type: none"> a. Informasi Tentang Proses Penetapan RTS-PM b. Informasi tentang proses penyaluran Raskin 2. Data Sekunder: <ol style="list-style-type: none"> a. Bentuk Geografis Daerah b. Jumlah penduduk 	BPS Kota Solok, Pihak Kecamatan Lubuk Sikarah, Pihak Kelurahan VISuku dan Responden	Wawancara	Pengamatan dan analisa kualitaitaif secara deskriptif
2	Menganalisis efektifitas pelaksanaan program raskin di Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok berdasarkan indikator keberhasilannya	Efektifitas Program Raskin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tepat Sasaran 2. Tepat Jumlah 3. Tepat Harga 4. Tepat Waktu 5. Tepat Administrasi 6. Tepat Kualitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Primer: Informasi tentang proses penyaluran Raskin 2. Data Sekunder: <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah penduduk b. Jumlah RTS-PM 	BPS Kota Solok, Bulog Kota Solok Pihak Kecamatan Lubuk Sikarah, Pihak Kelurahan VISuku dan Responden	Wawancara	Pengamatan dan analisa kualitaitaif secara deskriptif

Lampiran 2. Alokasi Beras Raskin Kota Solok Tahun 2010.

No.	Kecamatan	Titik Distribusi	Plafon	Raskin	Ket.
			KK	Kg	
1	Lubuk Sikarah		887	13.305	
		Ktr lurah Tanah Garam	381	5.715	
		Ktr lurah VI Suku	139	2.085	
		Ktr lurah Sinapa Piliang	32	480	
		Ktr lurah IX Korong	57	855	
		Ktr lurah KTK	68	1.020	
		Ktr lurah Aro IX Korong	81	1.215	
		Ktr lurah Simp. Rumbio	129	1.935	
2	Tanjung Harapan		1.041	15.615	
		Ktr lurah Kampung Jawa	228	3.420	
		Ktr lurah Tanjung Paku	245	3.675	
		Ktr lurah Nan Balimo	209	3.135	
		Ktr lurah Koto Panjang	115	1.725	
		Ktr lurah PPA	167	2.505	
		Ktr lurah Laiang	77	1.155	
Jumlah			1.928	28.920	

Sumber : Sekertariat Daerah Kota Solok, 2010.

Lampiran 3. Jumlah KK Miskin Kota Solok

No.	Kecamatan	Kelurahan	KK Miskin
A	Lubuk Sikarah		
		Tanah Garam	409
		VI Suku	168
		Sinapa Piliang	37
		IX Korong	78
		KTK	86
		Aro IV Korong	102
		Simpang Rumbio	148
			1028
B	Tanjung Harapan		
		Kampung Jawa	242
		Tanjung Paku	296
		Nan balimo	274
		Koto Panjang	119
		Pandan Air Mati	168
		Laiang	95
			1194

Sumber : Kota Solok dalam Angka 2008/2009

Lampiran 4. Identitas Responden Penerima Manfaat

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Agama	Pendidikan	Pekerjaan	Jmlh Tanggungan	Penghasilan/bln	Pengeluaran/bln	Frekuensi Makan	Bahan bakar yg dipakai
1	Yudiswandura	L	43	Islam	Tamat SMA	Swasta	4	> 1 jt	> 1 jt	3 X	Minyak Tanah
2	Darwin	L	60	Islam	Tamat SMP	Swasta	2	500 rb - 1 jt	> 1 jt	2 X	Minyak Tanah
3	Edi Yuspal	L	47	Islam	Tamat SMA	Swasta	5	> 1 jt	> 1 jt	3 X	Minyak Tanah
4	Idalius	P	40	Islam	Tamat SMP	Swasta	2	500 rb - 1 jt	500 rb - 1 jt	3 X	Minyak Tanah
5	Buranis	L	45	Islam	Tamat SMP	Tani	8	0 - 500 rb	500 rb - 1 jt	2 X	Kayu
6	Herman	L	46	Islam	Tamat SD	Buruh	7	> 1 jt	> 1 jt	3 X	Kayu
7	Zulfadli	L	45	Islam	Tamat SD	Tani	4	0 - 500 rb	0 - 500 rb	3 X	Kayu
8	Mansyurdi	L	40	Islam	Tamat SMP	Buruh	6	> 1 jt	> 1 jt	3 X	Kayu
9	Syafarudin	L	52	Islam	Tamat SD	Tani	3	0 - 500 rb	0 - 500 rb	2 X	Minyak Tanah
10	Wasnidar	P	47	Islam	Tamat SMP	Swasta	3	0 - 500 rb	0 - 500 rb	3 X	Kayu
11	Asni	P	45	Islam	Tamat SMA	Swasta	2	0 - 500 rb	0 - 500 rb	3 X	Kayu
12	Ali Umar	L	51	Islam	Tamat SD	Tani	4	0 - 500 rb	0 - 500 rb	3 X	Minyak Tanah
13	Yusparida	L	54	Islam	Tamat SMP	Swasta	4	500 rb - 1 jt	500 rb - 1 jt	3 X	Minyak Tanah
14	Ridwan	L	38	Islam	Tamat SMA	Swasta	2	0 - 500 rb	0 - 500 rb	3 X	Minyak Tanah
15	Darlis	L	51	Islam	Tamat SD	Buruh	5	500 rb - 1 jt	500 rb - 1 jt	3 X	Minyak Tanah
16	Suarlis	L	43	Islam	Tamat SMA	Buruh	4	> 1 jt	> 1 jt	3 X	Kayu
17	Masni	L	55	Islam	Tamat SMP	Swasta	4	500 rb - 1 jt	500 rb - 1 jt	3 X	Kayu
18	Rosmiati	P	53	Islam	Tamat SMP	Swasta	2	500 rb - 1 jt	500 rb - 1 jt	3 X	Minyak Tanah
19	Sapar	L	41	Islam	Tamat SMA	Buruh	3	> 1 jt	> 1 jt	3 X	Minyak Tanah
20	Hendriyanto	L	35	Islam	Tamat SMA	Swasta	3	> 1 jt	> 1 jt	3 X	Minyak Tanah
21	Agus Mandaro	L	56	Islam	Tamat SMA	Tani	2	0 - 500 rb	0 - 500 rb	2 X	Kayu
22	Armen	L	40	Islam	Tamat SMA	Swasta	4	500 rb - 1 jt	500 rb - 1 jt	3 X	Kayu

Lampiran 4. Identitas Responden Penerima Manfaat (sambungan)

23	Yusrizal	L	48	Islam	Tamat SMP	Buruh	3	> 1 jt	> 1 jt	3 X	Minyak Tanah
24	Kamidar	L	54	Islam	Tamat SMP	Swasta	3	500 rb - 1 jt	500 rb - 1 jt	3 X	Minyak Tanah
25	Sawar	L	44	Islam	Tamat SMA	Tani	5	500 rb - 1 jt	500 rb - 1 jt	3 X	Kayu
26	Sabardi	L	39	Islam	Tamat SMA	Buruh	4	> 1 jt	> 1 jt	3 X	Minyak Tanah
27	Edwar	L	37	Islam	Tamat SMA	Swasta	5	> 1 jt	> 1 jt	3 X	Minyak Tanah
28	Dodi	L	41	Islam	Tamat SMP	Swasta	3	500 rb - 1 jt	500 rb - 1 jt	3 X	Kayu
29	Yusmiani	P	53	Islam	Tamat SD	Swasta	2	0 - 500,rb	0 - 500 rb	3 X	Kayu
30	Ruslan	L	58	Islam	Tamat SD	Buruh	4	500 rb - 1 jt	500 rb - 1 jt	3 X	Kayu
31	Jasmaniar	L	42	Islam	Tamat SMP	Buruh	3	> 1 jt	> 1 jt	3 X	Minyak Tanah
32	Kamardi	L	40	Islam	Tamat SD	Buruh	5	> 1 jt	1 jt	3 X	Kayu
33	Basri	L	43	Islam	Tamat SMP	Swasta	4	500 rb - 1 jt	500 rb - 1 jt	3 X	Minyak Tanah
34	Pedri	L	52	Islam	Tamat SD	Tani	3	0 - 500,rb	0 - 500 rb	3 X	Minyak Tanah
35	Syamsir	L	56	Islam	Tamat SD	Tani	4	0 - 500,rb	0 - 500 rb	3 X	Kayu
36	Mursidin	L	47	Islam	Tamat SMP	Swasta	5	> 1 jt	> 1 jt	3 X	Minyak Tanah
37	Thomas Ariantes	L	35	Islam	Tamat SMA	Buruh	3	500 rb - 1 jt	500 rb - 1 jt	3 X	Minyak Tanah
38	Mainir	P	43	Islam	Tamat SMA	Swasta	2	500 rb - 1 jt	500 rb - 1 jt	3 X	Kayu
39	Liswardi	L	50	Islam	Tamat SMP	Tani	3	0 - 500,rb	0 - 500 rb	3 X	Kayu
40	Rahzul Alam	L	37	Islam	Tamat SMA	Buruh	3	500 rb - 1 jt	500 rb - 1 jt	3 X	Minyak Tanah
41	Darwin	L	40	Islam	Tamat SMA	Swasta	4	500 rb - 1 jt	500 rb - 1 jt	3 X	Minyak Tanah
42	Islami	L	46	Islam	Tamat SMA	Buruh	5	> 1 jt	> 1 jt	3 X	Minyak Tanah

Lampiran 5. Kondisi Fisik Rumah Responden

No	Nama	Kondisi Rumah							Kemampuan Membeli daging/ayam dlm 1 mgu	Kemampuan berobat ke Puskesmas	aset/barang berharga min Rp. 500 rb
		luas (M2)	Lantai	Dinding	Atap	Jamban	Air bersih	Listrik			
1	Yudiswandra	54	Semen	Tembok	Seng	Ada	Ada	Ada	Ya	Mampu	Tidak Ada
2	Darwin	42	Papan	Papan	Seng	Ada	Ada	Ada	Tidak	Mampu	Tidak Ada
3	Edi Yuspal	84	Papan	Papan	Seng	Ada	Ada	Ada	Ya	Mampu	Ada
4	Idalius	12	Papan	Papan	Seng	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Mampu	Tidak Ada
5	Buranis	20	Semen	Tembok	Seng	Tidak	Tidak	Ada	Tidak	Mampu	Tidak Ada
6	Herman	48	Semen	Papan	Seng	Ada	Ada	Ada	Tidak	Mampu	Tidak Ada
7	Zulfadli	24	Semen	Tembok	Seng	Ada	Ada	Ada	Tidak	Mampu	Tidak Ada
8	Mansyurdi	27	Semen	Semi Tembok	Seng	Tidak	Ada	Ada	Tidak	Mampu	Tidak Ada
9	Syafarudin	80	Semen	Tembok	Seng	Ada	Ada	Ada	Tidak	Mampu	Tidak Ada
10	Wasnidar	48	Papan	Semi Tembok	Seng	Ada	Ada	Ada	Tidak	Mampu	Tidak Ada
11	Asni	63	Papan	Papan	Seng	Ada	Tidak	Ada	Tidak	Mampu	Tidak Ada
12	Ali Umar	70	Semen	Tembok	Seng	Ada	Ada	Ada	Tidak	Mampu	Tidak Ada
13	Yusparida	91	Semen	Tembok	Seng	Ada	Ada	Ada	Tidak	Mampu	Tidak Ada
14	Ridwan	48	Papan	Papan	Seng	Tidak	Ada	Ada	Tidak	Mampu	Tidak Ada
15	Darlis	64	Papan	Semi Tembok	Seng	Ada	Ada	Ada	Tidak	Mampu	Tidak Ada
16	Suarlis	42	Semen	Semi Tembok	Seng	Ada	Ada	Ada	Ya	Mampu	Ada
17	Masni	60	Semen	Papan	Seng	Ada	Ada	Ada	Tidak	Mampu	Tidak Ada
18	Rosmiati	72	Semen	Tembok	Seng	Ada	Ada	Ada	Tidak	Mampu	Tidak Ada
19	Sapar	56	Semen	Tembok	Seng	Ada	Ada	Ada	Tidak	Mampu	Ada
20	Hendriyanto	80	Semen	Semi Tembok	Seng	Ada	Ada	Ada	Ya	Mampu	Ada
21	Agus Mandaro	24	Semen	Papan	Seng	Tidak	Ada	Ada	Tidak	Mampu	Tidak Ada
22	Armen	91	Papan	Papan	Seng	Ada	Ada	Ada	Tidak	Mampu	Tidak Ada
23	Yusrizal	49	Semen	Tembok	Seng	Ada	Ada	Ada	Tidak	Mampu	Tidak Ada

Lampiran 5. Kondisi Fisik Rumah Responden (sambungan)

24	Kamidar	48	Semen	Semi Tembok	Seng	Ada	Ada	Ada	Tidak	Mampu	Tidak Ada
25	Sawar	84	Semen	Tembok	Seng	Ada	Ada	Ada	Tidak	Mampu	Tidak Ada
26	Sabardi	48	Semen	Papan	Seng	Ada	Ada	Ada	Ya	Mampu	Tidak Ada
27	Edwar	70	Semen	Tembok	Seng	Ada	Ada	Ada	Ya	Mampu	Ada
28	Dodi	40	Papan	Papan	Seng	Ada	Ada	Ada	Tidak	Mampu	Tidak Ada
29	Yusmiani	27	Papan	Papan	Seng	Tidak	Ada	Ada	Tidak	Mampu	Tidak Ada
30	Ruslan	64	Semen	Semi Tembok	Seng	Ada	Ada	Ada	Tidak	Mampu	Tidak Ada
31	Jasmaniar	100	Semen	Tembok	Seng	Ada	Ada	Ada	Ya	Mampu	Ada
32	Kamardi	63	Semen	Papan	Seng	Ada	Ada	Ada	Tidak	Mampu	Tidak Ada
33	Basri	56	Papan	Papan	Seng	Ada	Ada	Ada	Tidak	Mampu	Tidak Ada
34	Pedri	24	Semen	Papan	Seng	Tidak	Ada	Ada	Tidak	Mampu	Tidak Ada
35	Syamsir	48	Semen	Semi Tembok	Seng	Ada	Ada	Ada	Tidak	Mampu	Tidak Ada
36	Mursidin	120	Papan	Papan	Seng	Ada	Ada	Ada	Ya	Mampu	Tidak Ada
37	Thomas Arianes	64	Semen	Papan	Seng	Ada	Ada	Ada	Tidak	Mampu	Tidak Ada
38	Mainir	84	Semen	Papan	Seng	Ada	Ada	Ada	Tidak	Mampu	Tidak Ada
39	Liswardi	91	Semen	Semi Tembok	Seng	Ada	Ada	Ada	Tidak	Mampu	Tidak Ada
40	Rahzul Alam	48	Semen	Tembok	Seng	Ada	Ada	Ada	Tidak	Mampu	Ada
41	Darwin	70	Papan	Papan	Seng	Ada	Ada	Ada	Tidak	Mampu	Tidak Ada
42	Islami	72	Semen	Tembok	Seng	Ada	Ada	Ada	Tidak	Mampu	Tidak Ada

Lampiran 6. Hasil Pelaksanaan raskin

No	Lama menerima raskin	Jumlah yg Diterima	Harga (Rp)	Tepat Waktu			Kualitas Layanan			Kondisi Beras			
				Tgl Menerima	Tiap Berapa Bulan	Lama Keterlambatan	Memperoleh Informasi	Jangkauan Pengambilan	keramahan Petugas	Kualitas Beras	Bewarna Cerah	Jika tidak, warna apa	Berbau
1	2 Tahun	15	1600	Setelah tgl 15	2 bulan	5 hari	Cukup	Mudah	Ramah	Cukup	Tidak	Kekuningan	Tidak
2	> 3 Tahun	15	1600	Setelah tgl 15	2 bulan	5 hari	Mudah	Mudah	Ramah	Cukup	Tidak	Kekuningan	Ya
3	3 Tahun	15	1600	Setelah tgl 15	2 bulan	6 hari	Mudah	Mudah	Ramah	Cukup	Tidak	Kekuningan	Ya
4	> 3 Tahun	15	1600	Setelah tgl 15	2 bulan	4 hari	Cukup	Cukup	Ramah	Cukup	Tidak	Agak Merah	Ya
5	> 3 Tahun	15	1600	Setelah tgl 15	2 bulan	3 hari	Mudah	Tidak	Ramah	Cukup	Tidak	Kekuningan	Ya
6	2 Tahun	15	1600	Setelah tgl 15	2 bulan	7 hari	Mudah	Tidak	Cukup	Cukup	Tidak	Kekuningan	Ya
7	> 3 Tahun	15	1600	Setelah tgl 15	2 bulan	6 hari	Mudah	Tidak	Ramah	Cukup	Ya		Tidak
8	> 3 Tahun	15	1600	Setelah tgl 15	2 bulan	6 hari	Mudah	Mudah	Ramah	Kurang	Tidak	Agak Merah	Ya
9	2 Tahun	15	1600	Setelah tgl 15	2 bulan	5 hari	Mudah	Mudah	Ramah	Cukup	Tidak	Kekuningan	Ya
10	2 Tahun	15	1600	Setelah tgl 15	2 bulan	4 hari	Mudah	Mudah	Ramah	Kurang	Tidak	Kekuningan	Ya
11	1 Tahun	15	1600	Setelah tgl 15	2 bulan	7 hari	Cukup	Mudah	Ramah	Kurang	Tidak	Kekuningan	Ya
12	2 Tahun	15	1600	Setelah tgl 15	2 bulan	2 hari	Mudah	Mudah	Ramah	Cukup	Tidak	Kekuningan	Ya
13	> 3 Tahun	15	1600	Setelah tgl 15	2 bulan	3 hari	Mudah	Mudah	Ramah	Cukup	Tidak	Agak Merah	Ya
14	> 3 Tahun	15	1600	Setelah tgl 15	2 bulan	5 hari	Mudah	Mudah	Ramah	Cukup	Tidak	Kekuningan	Ya
15	2 Tahun	15	1600	Setelah tgl 15	2 bulan	4 hari	Mudah	Mudah	Ramah	Cukup	Tidak	Agak Merah	Ya
16	3 Tahun	15	1600	Setelah tgl 15	2 bulan	2 hari	Mudah	Tidak	Cukup	Baik	Ya		Tidak
17	3 Tahun	15	1600	Setelah tgl 15	2 bulan	7 hari	Mudah	Mudah	Ramah	Kurang	Tidak	Kekuningan	Ya
18	2 Tahun	15	1600	Setelah tgl 15	2 bulan	6 hari	Cukup	Tidak	Ramah	Kurang	Tidak	Kekuningan	Ya
19	2 Tahun	15	1600	Setelah tgl 15	2 bulan	5 hari	Mudah	Mudah	Ramah	Cukup	Tidak	Kekuningan	Ya
20	3 Tahun	15	1600	Setelah tgl 15	2 bulan	4 hari	Mudah	Mudah	Ramah	Cukup	Tidak	Kekuningan	Ya
21	2 Tahun	15	1600	Setelah tgl 15	2 bulan	3 hari	Mudah	Mudah	Ramah	Cukup	Tidak	Kekuningan	Ya
22	2 Tahun	15	1600	Setelah tgl 15	2 bulan	4 hari	Mudah	Mudah	Cukup	Cukup	Tidak	Agak Merah	Ya
23	1 Tahun	15	1600	Setelah tgl 15	2 bulan	4 hari	Mudah	Mudah	Cukup	Kurang	Tidak	Kekuningan	Ya

Lampiran 6. Hasil Pelaksanaan raskin (sambungan)

24	> 3 Tahun	15	1600	Setelah tgl 15	2 bulan	4 hari	Mudah	Mudah	Ramah	Cukup	Tidak	Kekuningan	Ya
25	> 3 Tahun	15	1600	Setelah tgl 15	2 bulan	5 hari	Mudah	Tidak	Ramah	Kurang	Tidak	Kekuningan	Ya
26	3 Tahun	15	1600	Setelah tgl 15	2 bulan	6 hari	Cukup	Mudah	Ramah	Kurang	Tidak	Kekuningan	Ya
27	1 Tahun	15	1600	Setelah tgl 15	2 bulan	2 hari	Mudah	Mudah	Ramah	Baik	Ya		Tidak
28	> 3 Tahun	15	1600	Setelah tgl 15	2 bulan	3 hari	Cukup	Mudah	Ramah	Kurang	Tidak	Agak Merah	Ya
29	3 Tahun	15	1600	Setelah tgl 15	2 bulan	6 hari	Cukup	Mudah	Cukup	Cukup	Tidak	Agak Merah	Ya
30	3 Tahun	15	1600	Setelah tgl 15	2 bulan	4 hari	Mudah	Mudah	Ramah	Cukup	Tidak	Kekuningan	Ya
31	2 Tahun	15	1600	Setelah tgl 15	2 bulan	5 hari	Mudah	Cukup	Ramah	Cukup	Tidak	Kekuningan	Ya
32	1 Tahun	15	1600	Setelah tgl 15	2 bulan	5 hari	Mudah	Mudah	Ramah	Cukup	Tidak	Kekuningan	Ya
33	3 Tahun	15	1600	Setelah tgl 15	2 bulan	7 hari	Mudah	Mudah	Ramah	Kurang	Tidak	Kekuningan	Ya
34	>3 Tahun	15	1600	Setelah tgl 15	2 bulan	6 hari	Mudah	Mudah	Ramah	Kurang	Tidak	Kekuningan	Ya
35	1 Tahun	15	1600	Setelah tgl 15	2 bulan	6 hari	Cukup	Mudah	Ramah	Cukup	Tidak	Kekuningan	Ya
36	2 Tahun	15	1600	Setelah tgl 15	2 bulan	5 hari	Mudah	Mudah	Ramah	Cukup	Tidak	Kekuningan	Ya
37	> 3 Tahun	15	1600	Setelah tgl 15	2 bulan	7 hari	Mudah	Cukup	Ramah	Cukup	Tidak	Kekuningan	Ya
38	2 Tahun	15	1600	Setelah tgl 15	2 bulan	6 hari	Mudah	Mudah	Ramah	Cukup	Tidak	Kekuningan	Ya
39	2 Tahun	15	1600	Setelah tgl 15	2 bulan	3 hari	Cukup	Mudah	Ramah	Kurang	Tidak	Kekuningan	Ya
40	3 Tahun	15	1600	Setelah tgl 15	2 bulan	6 hari	Cukup	Mudah	Ramah	Kurang	Tidak	Kekuningan	Ya
41	> 3 Tahun	15	1600	Setelah tgl 15	2 bulan	5 hari	Cukup	Mudah	Ramah	Kurang	Tidak	Agak Merah	Ya
42	2 Tahun	15	1600	Setelah tgl 15	2 bulan	4 hari	Mudah	Mudah	Ramah	Cukup	Tidak	Kekuningan	Ya

Lampiran 7. Penerima Raskin Sesuai Kriteria BPS

	luas lantai (m2)	jenis lantai	jenis dinding	fasilitas jamban	penerangan (listrik)	sumber air minum	bahan bakar	mengonsumsi daging dlm 1 mgu	membeli pakaian dlm 1 tahun	frekuensi makan	kemampuan berobat ke puskesmas	sumber penghasilan KK	pendidikan KK	memiliki tabungan	kriteria
1	54	semen	tembok	ada	ada	ada	minyak tanah	Ya	mampu	3 X	Mampu	Swasta	Tamat SMA	Tidak Ada	tidak tepat
2	42	papan	papan	ada	ada	ada	minyak tanah	Tidak	tidak	2 X	Mampu	Swasta	Tamat SMP	Tidak Ada	tepat
3	84	Papan	Papan	Ada	Ada	Ada	Minyak Tanah	Ya	mampu	3 X	Mampu	Swasta	Tamat SMA	Ada	tidak tepat
4	12	Papan	Papan	Tidak	Tidak	Tidak	Minyak Tanah	Tidak	tidak	3 X	Mampu	Swasta	Tamat SMP	Tidak Ada	tepat
5	20	Semen	Tembok	Tidak	Ada	Tidak	Kayu	Tidak	tidak	2 X	Mampu	Tani	Tamat SMP	Tidak Ada	tepat
6	48	Semen	Papan	Ada	Ada	Ada	Kayu	Tidak	tidak	3 X	Mampu	Buruh	Tamat SD	Tidak Ada	tepat
7	24	Semen	Tembok	Ada	Ada	Ada	Kayu	Tidak	tidak	3 X	Mampu	Tani	Tamat SD	Tidak Ada	tepat
8	27	Semen	Semi Tembok	Tidak	Ada	Ada	Kayu	Tidak	tidak	3 X	Mampu	Buruh	Tamat SMP	Tidak Ada	tepat
9	80	Semen	Tembok	Ada	Ada	Ada	Minyak Tanah	Tidak	tidak	2 X	Mampu	Tani	Tamat SD	Tidak Ada	tepat
10	48	Papan	Semi Tembok	Ada	Ada	Ada	Kayu	Tidak	mampu	3 X	Mampu	Swasta	Tamat SMP	Tidak Ada	tidak tepat
11	63	Papan	Papan	Ada	Ada	Tidak	Kayu	Tidak	tidak	3 X	Mampu	Swasta	Tamat SMA	Tidak Ada	tepat
12	70	Semen	Tembok	Ada	Ada	Ada	Minyak Tanah	Tidak	tidak	3 X	Mampu	Tani	Tamat SD	Tidak Ada	tepat
13	91	Semen	Tembok	Ada	Ada	Ada	Minyak Tanah	Tidak	mampu	3 X	Mampu	Swasta	Tamat SMP	Tidak Ada	tidak tepat
14	48	Papan	Papan	Tidak	Ada	Ada	Minyak Tanah	Tidak	tidak	3 X	Mampu	Swasta	Tamat SMA	Tidak Ada	tepat
15	64	Papan	Semi Tembok	Ada	Ada	Ada	Minyak Tanah	Tidak	tidak	3 X	Mampu	Buruh	Tamat SD	Tidak Ada	tepat
16	42	Semen	Semi Tembok	Ada	Ada	Ada	Kayu	Ya	mampu	3 X	Mampu	Buruh	Tamat SMA	Ada	tidak tepat
17	60	Semen	Papan	Ada	Ada	Ada	Kayu	Tidak	tidak	3 X	Mampu	Swasta	Tamat SMP	Tidak Ada	tidak tepat
18	72	Semen	Tembok	Ada	Ada	Ada	Minyak Tanah	Tidak	mampu	3 X	Mampu	Swasta	Tamat SMP	Tidak Ada	tidak tepat
19	56	Semen	Tembok	Ada	Ada	Ada	Minyak Tanah	Tidak	tidak	3 X	Mampu	Buruh	Tamat SMA	Ada	tepat
20	80	Semen	Semi Tembok	Ada	Ada	Ada	Minyak Tanah	Ya	mampu	3 X	Mampu	Swasta	Tamat SMA	Ada	tidak tepat
21	24	Semen	Papan	Tidak	Ada	Ada	Kayu	Tidak	tidak	2 X	Mampu	Tani	Tamat SMA	Tidak Ada	tepat
22	91	Papan	Papan	Ada	Ada	Ada	Kayu	Tidak	mampu	3 X	Mampu	Swasta	Tamat SMA	Tidak Ada	tidak tepat
23	49	Semen	Tembok	Ada	Ada	Ada	Minyak Tanah	Tidak	tidak	3 X	Mampu	Buruh	Tamat SMP	Tidak Ada	tepat

24	48	Semen	Semi Tembok	Ada	Ada	Ada	Minyak Tanah	Tidak	mampu	3 X	Mampu	Swasta	Tamat SMP	Tidak Ada	tidak tepat
25	84	Semen	Tembok	Ada	Ada	Ada	Kayu	Tidak	tidak	3 X	Mampu	Tani	Tamat SMA	Tidak Ada	tepat
26	48	Semen	Papan	Ada	Ada	Ada	Minyak Tanah	Ya	mampu	3 X	Mampu	Buruh	Tamat SMA	Tidak Ada	tidak tepat
27	70	Semen	Tembok	Ada	Ada	Ada	Minyak Tanah	Ya	mampu	3 X	Mampu	Swasta	Tamat SMA	Ada	tidak tepat
28	40	Papan	Papan	Ada	Ada	Ada	Kayu	Tidak	tidak	3 X	Mampu	Swasta	Tamat SMP	Tidak Ada	tepat
29	27	Papan	Papan	Tidak	Ada	Ada	Kayu	Tidak	tidak	3 X	Mampu	Swasta	Tamat SD	Tidak Ada	tepat
30	64	Semen	Semi Tembok	Ada	Ada	Ada	Kayu	Tidak	tidak	3 X	Mampu	Buruh	Tamat SD	Tidak Ada	tepat
31	100	Semen	Tembok	Ada	Ada	Ada	Minyak Tanah	Ya	mampu	3 X	Mampu	Buruh	Tamat SMP	Ada	tidak tepat
32	63	Semen	Papan	Ada	Ada	Ada	Kayu	Tidak	tidak	3 X	Mampu	Buruh	Tamat SD	Tidak Ada	tepat
33	56	Papan	Papan	Ada	Ada	Ada	Minyak Tanah	Tidak	mampu	3 X	Mampu	Swasta	Tamat SMP	Tidak Ada	tidak tepat
34	24	Semen	Papan	Tidak	Ada	Ada	Minyak Tanah	Tidak	tidak	3 X	Mampu	Tani	Tamat SD	Tidak Ada	tepat
35	48	Semen	Semi Tembok	Ada	Ada	Ada	Kayu	Tidak	tidak	3 X	Mampu	Tani	Tamat SD	Tidak Ada	tepat
36	120	Papan	Papan	Ada	Ada	Ada	Minyak Tanah	Ya	mampu	3 X	Mampu	Swasta	Tamat SMP	Tidak Ada	tidak tepat
37	64	Semen	Papan	Ada	Ada	Ada	Minyak Tanah	Tidak	tidak	3 X	Mampu	Buruh	Tamat SMA	Tidak Ada	tepat
38	84	Semen	Papan	Ada	Ada	Ada	Kayu	Tidak	mampu	3 X	Mampu	Swasta	Tamat SMA	Tidak Ada	tidak tepat
39	91	Semen	Semi Tembok	Ada	Ada	Ada	Kayu	Tidak	mampu	3 X	Mampu	Tani	Tamat SMP	Tidak Ada	tidak tepat
40	48	Semen	Tembok	Ada	Ada	Ada	Minyak Tanah	Tidak	tidak	3 X	Mampu	Buruh	Tamat SMA	Ada	tepat
41	70	Papan	Papan	Ada	Ada	Ada	Minyak Tanah	Tidak	mampu	3 X	Mampu	Swasta	Tamat SMA	Tidak Ada	tidak tepat
42	72	Semen	Tembok	Ada	Ada	Ada	Minyak Tanah	Tidak	tidak	3 X	Mampu	Buruh	Tamat SMA	Tidak Ada	tepat

BERITA ACARA SERAH TERIMA BERAS RASKIN

No. 004/10/10/Kota Solok/RAS

Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Wali Kota Solok No: 570/152/PPM/X-2010 Tanggal 05 Oktober 2010 dan SPPB/DO No 043/10/10 /022/01 /RAS. Tanggal 19 Oktober 2010. Pada hari ini Rabu tanggal 20 Oktober 2010 kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ALHARLAN.A
Jabatan : Satker RASKIN Subdivre Solok

Selanjutnya disebut PIHAK I

2. Nama : FEBRIA CAROLINA,SE.
Jabatan : Pelaksana Distribusi Kelurahan VI Suku
Kec. Lubuk Sikarah

Selanjutnya disebut PIHAK II

PIHAK I telah menyerahkan beras RASKIN untuk alokasi bulan **Oktober 2010** sebanyak 2.085 Kg untuk 139 RTS-PM dan PIHAK II telah menerima beras kualitas baik sesuai standar Bulog sebanyak tersebut di atas dengan pembayaran terhutang selambat-lambatnya tanggal **25 Oktober** Penyerahan beras sampai kepada keluarga Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat menjadi tanggung jawab PIHAK II. Demikian Berita Acara Serah Terima Beras Raskin dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

VI Suku , 20 Oktober 2010

PIHAK II ,

FEBRIA CAROLINA,SE.

PIHAK I,

 Sub Divre Solok
 Satker Raskin
ALHARLAN.A

Mengetahui:
Lurah / SekLur

RUSMAN RUSDI
NIP. 19581003 198503 1 001



KARTU RASKIN TAHUN 2010

Nama Kepala Rumah Tangga : RUDI HARTONO
 Umur :
 Alamat : RT 02/I
 Kelurahan : VI Suku
 Kecamatan : Lb. Sikarah
 Kota : SOLOK
 Provinsi : SUMATERA BARAT
 Jumlah beras per bulan : 15 kg
 (kg/RTS-PM) :

Solok, 31 Maret 2010

Penerima Manfaat
Kepala Rumah Tangga,

Tim Koordinasi RASKIN
Kota Solok
Ketua.

(RUDI HARTONO)





PEMERINTAH KOTA SOLOK
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
 Jalan Lubuk Sikarah No.89 Kota Solok Telp (0755) 20084

71

Solok, 12 April 2010 M
 RabiulAkhir 1431 H

Nomor : 570/117PPM/IV-2010
 Lampiran :
 Perihal : **Rekomendasi Penyaluran Raskin**
Bulan APRIL 2010

Kepada Yth :
 Sdr. Kepala Bulog
 Sub Divre Wilayah II Solok

**Di-
 SOLOK**

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan Rekomendasi Permintaan Penyaluran RASKIN Kota Solok untuk Bulan APRIL 2010, berdasarkan Surat Keputusan Pagu Raskin Walikota Solok Nomor. 188.45/14/KPTS/WSL/2010 tanggal 11 Januari 2010, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Titik Distribusi	Plafon Raskin		Ket
			KK	Kg	
A.	Lubuk Sikarah		887	13.305	
1.		Ktr Lurah Tanah Garam	381	5.715	
2.		Ktr Lurah VI Suku	139	2.085	
3.		Ktr Lurah Sinapa Piliang	32	480	
4.		Ktr Lurah IX Korong	57	855	
5.		Ktr Lurah KTK	68	1.020	
6.		Ktr Lurah Aro IV Korong	81	1215	
7.	Ktr Lurah Simpang Rumbio	129	1.935		
B.	Tanjung Harapan		1.041	15.615	
1.		Ktr Lurah Kampung Jawa	228	3.420	
2.		Ktr Lurah Tanjung Paku	245	3.675	
3.		Ktr Lurah Nan Balimo	209	3.135	
4.		Ktr Lurah Koto Panjang	115	1.725	
5.		Ktr Lurah PPA	167	2.505	
6.	Ktr Lurah Laing	77	1.155		
JUMLAH			1.928	28.920	

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


ASISTEN BIDANG Adm Pembangunan
H. ZUL ELFIAN, SH, M.Si
 Nip. 19611208 198903 1 003

Lampiran 11. Indikator Keberhasilan Program Raskin

(1) Tepat sasaran

Dapat diukur dengan menghitung persentase jumlah sampel yang sesuai dengan kriteria sebagai penerima Raskin, dibagi dengan jumlah sampel secara keseluruhan yang mendapat Raskin.

$$TS_{(\%)} = \frac{\sum \text{sampel sesuai kriteria}}{\sum \text{sampel keseluruhan}} \times 100\%$$

(2) Tepat jumlah

Dapat diukur dengan cara mendata jumlah beras yang diterima tiap sampel RTS-PM dibagi jumlah beras standar.

$$TJ_{(\%)} = \frac{\sum \text{beras yang diterima}}{\sum \text{beras sesuai pagu}} \times 100\%$$

(3) Tepat harga

Dapat diukur dengan cara mendata harga tebus beras oleh sampel dibandingkan dengan harga standart sesuai dengan petunjuk umum (Rp. 1.600,-) di Titik Distribusi.

$$TH_{(\%)} = \frac{Rp. 1.600,-}{\text{Rata-rata harga tebus}} \times 100\%$$

(4) Tepat waktu

Dapat diukur dengan menghitung persentase rata-rata skor jadwal waktu pendistribusian beras ke sampel, dengan skor ideal yang telah ditetapkan yaitu 5 untuk tidak ada keterlambatan, 4 untuk keterlambatan 1-2 hari, 3 untuk

keterlambatan 3-5 hari, 2 untuk keterlambatan 6-8 hari dan 1 untuk keterlambatan lebih dari 8 hari.

$$TP_{(\%)} = \frac{\text{rata-rata skor}}{5} \times 100\%$$

5

(5) Tepat administrasi

Dapat diukur dengan menghitung berapa persen pemenuhan aplikasi dari 10 aspek administrasi yang digariskan sebagai berikut : juknis Raskin, SK penetapan RTS, SK pengangkatan petugas, daftar penerima raskin, kartu RTS, kupon beras, berita acara penerimaan beras, catatan penerima pembayaran, berita acara pendistribusian, bukti setor pembayaran.

$$TA_{(\%)} = \frac{\text{komponen yang dipenuhi}}{10} \times 100\%$$

10

(6) Tepat Kualitas

Tepat kualitas merupakan persentase ketepatan kualitas beras yang diterima oleh sampel dibandingkan kualitas standart Raskin.

